



# **PERBATASAN NKRI - RDTL**

## **SEBAGAI LABORATORIUM GOVERNANSI TRANSFORMATIF:**

*Perspektif dan Praktik Ilmu Pemerintahan*

**Tim Penulis:**

Egidius Fkun, Elpius KalemBang, Bernardus Seran Kehik, Dian Festianto,  
Surya Yudha Regif, Yohanes Imanuel Naif, Andre Pattipeilohy, Verawati Skaut,  
Handrianus Vianey Melin Wula, Fransiskus Atok, Yosef Kristoforus Taekab,  
Heribertus Binsasi, Ignasius Usboko, Marisa S. B. Seran, Handrianus Nino,  
Melkianus Suni, Medan Yonathan Mael, M. Angela Merici Siba,  
Mariano Sengkoen, Yakobus Kolne, Ronaldus Nurak, Remigius Seran,  
Fridus Bria, Adeodata Laniria Charla Barros Mbiri, Yosef Serano Korbaffo

# **PERBATASAN NKRI-RDTL SEBAGAI LABORATORIUM GOVERNANSI TRANSFORMATIF:**

*Perspektif dan Praktik Ilmu Pemerintahan*

**Tim Penulis:**

**Egidius Fkun, Elpius Kalemang, Bernardus Seran Kehik, Dian Festianto,  
Surya Yudha Regif, Yohanes Imanuel Naif, Andre Pattipeilohy, Verawati Skaut,  
Handrianus Vianey Melin Wula, Fransiskus Atok, Yosef Kristoforus Taekab,  
Heribertus Binsasi, Ignasius Usboko, Marisa S. B. Seran, Handrianus Nino,  
Melkianus Suni, Medan Yonathan Mael, M. Angela Merici Siba,  
Mariano Sengkoen, Yakobus Kolne, Ronaldus Nurak, Remigius Seran,  
Fridus Bria, Adeodata Laniria Charla Barros Mbiri, Yosef Serano Korbaffo**

# **PERBATASAN NKRI-RDTL SEBAGAI LABORATORIUM GOVERNANSI TRANSFORMATIF: PERSPEKTIF DAN PRAKTIK ILMU PEMERINTAHAN**

Tim Penulis:

**Egidius Fkun, Elpius Kalembang, Bernardus Seran Kehik, Dian Festianto, Surya Yudha Regif, Yohanes Imanuel Naif, Andre Pattipeilohy, Verawati Skaut, Handrianus Vianey Melin Wula, Fransiskus Atok, Yosef Kristoforus Taekab, Heribertus Binsasi, Ignasius Usboko, Marisa S. B. Seran, Handrianus Nino, Melkianus Suni, Medan Yonathan Mael, M. Angela Merici Siba, Mariano Sengkoen, Yakobus Kolne, Ronaldus Nurak, Remigius Seran, Fridus Bria, Adeodata Laniria Charla Barros Mbiri, Yosef Serano Korbaffo**

Desain Cover:

**Andi Juliandi**

Sumber Ilustrasi:

**[www.freepik.com](http://www.freepik.com)**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Egidius Fkun**

ISBN:

**978-634-246-644-5**

Cetakan Pertama:

**Februari, 2026**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## SEKAPUR SIRIH

Penerbitan buku berjudul “Perbatasan NKRI-RDTL sebagai Laboratorium Governansi Transformatif: Perspektif dan Praktik Ilmu Pemerintahan” merupakan suatu langkah maju memperkaya literatur dalam studi perbatasan. Dewasa ini perbatasan tidak saja dipandang sebagai arena pertarungan kepentingan nasional suatu negara tetapi sudah mulai digali lebih dalam sebagai cabang ilmu (*limology*). Buku bunga rampai ini ditulis oleh beberapa akademisi yang ingin menyumbangkan pikiran kritisnya bagi kemajuan ilmu pemerintahan (khususnya bidang perbatasan) sekaligus mendedikasinya kepada kampus perbatasan Universitas Negeri Timor yang memasuki usia perak (25 tahun).

Sasaran bidiknya bukan tentang diplomasi lintas batas melainkan mendiskusikan pengelolaan perbatasan area Indonesia apakah lebih tepat memilih pendekatan keamanan teritorial (*state security*) ataukah cenderung menerapkan strategi keamanan manusia (*human security*). Pilihan strategi tersebut didasarkan pada beberapa variabel antara lain; kondisi keamanan perbatasan, aspek sosial budaya dan tingkat fisibilitas. Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa strategi *human security* menjadi suatu keharusan untuk diterapkan di area perbatasan RI-RDTL sektor barat karena kondisi teritorial perbatasan yang relatif aman, adanya kesamaan budaya dan hubungan kekerabatan yang kuat antara masyarakat TTU dan Ambeno sebagai sesama *atoin meto*.

Secara kultural, cara pandang *atoin meto* terhadap sesama manusia sebagai *aok bian* sangat memungkinkan untuk menjalin persaudaraan di perbatasan “tanpa batas”. Cara pandang tersebut kemudian dimanifestasikan dalam tradisi *malo’et* yaitu saling menyuguhkan sirih pinang (dan kapur) sebagai simbol saling menerima satu sama lain selayaknya menerima diri sendiri apa adanya.

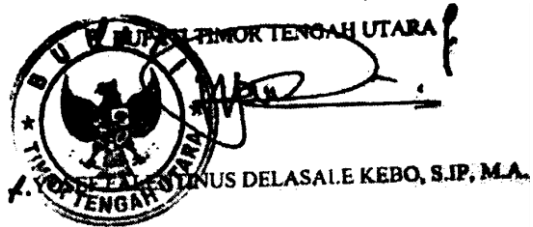
Dalam menata perbatasan dengan karakteristik khusus seperti ini, penting untuk menghadirkan *atoin meto governability* yaitu kemampuan pemerintah dan elit tradisional menjadi *problem solver*. Struktur adat seperti *usif*, *tobe*, *mnasi* dan lainnya adalah tokoh-tokoh sentral yang memiliki pengaruh dan (mungkin) kemampuan memberikan solusi. Karenanya, reposisi dan refungsionalisasi lembaga adat merupakan suatu keniscayaan agar menjadi partner pemerintah daerah dalam menempatkan diri sebagai aktor perubahan di tapal batas. Selain lembaga

adat, perguruan tinggi yang senantiasa bekerja dalam kontrol keilmiahan pun tampil dalam dua sisi yakni sebagai agen perubahan untuk mewujudkan wajah Indonesia yang mempesona sekaligus sebagai *second track diplomacy*.

Buku yang menawarkan banyak pilihan untuk menatap masa depan perbatasan nan cemerlang ini, kami sambut baik. Tidak saja membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan pengelolaan perbatasan, tetapi juga bagi dunia akademik untuk mendalami dan mengembangkan studi perbatasan. Karena itu, ucapan terima kasih pantas kami alamatkan kepada tim penulis yang telah berbagi dan tak lupa pula ucapan selamat kepada UNIMOR yang telah memasuki usia dewasa.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Kefamenanu, 29 September 2025



# DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SEKAPUR SIRIH .....</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>iii</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>v</b>       |
| <br><b>Antara Identitas Nasional dan Integrasi Global: Menganalisis Nasionalisme Indonesia dalam Dinamika Politik Kontemporer</b><br><i>Elpius Kalembang &amp; Bernardus Seran Kehik .....</i>                                                                | <br><b>1</b>   |
| <br><b>Memotret Tantangan dan Isu <i>Good Governance</i> di Indonesia</b><br><i>Dian Festianto .....</i>                                                                                                                                                      | <br><b>19</b>  |
| <br><b>Manajemen Strategis Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Melalui Kearifan Lokal Pasca Transisi Kepemimpinan Daerah pada Wilayah Perbatasan RI-RDTL dalam Mendukung Asta Cita</b><br><i>Surya Yudha Regif, Yohanes Imanuel Naif, Andre Pattipeilohy .....</i> | <br><b>37</b>  |
| <br><b>Aksesibilitas Perbatasan Indonesia-Timor Leste</b><br><i>Verawati Skaut .....</i>                                                                                                                                                                      | <br><b>53</b>  |
| <br><b>Suara Feto, Arah Desa: Membaca Pembangunan dari Perspektif Perempuan sebagai Narasi Transformasi Gender di Wilayah Adat Dawan</b><br><i>Handrianus Vianey Melin Wula &amp; Fransiskus Atok .....</i>                                                   | <br><b>67</b>  |
| <br><b>Budaya Politik Masyarakat Eks Timor Timur di Wilayah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara: Studi Kasus di Kecamatan Bikomi Ninulat</b><br><i>Yosef Kristoforus Taekab &amp; Heribertus Binsasi .....</i>                                            | <br><b>85</b>  |
| <br><b>Politik yang Membumi di Perbatasan: Praktik Manajemen Politik Adaptif dalam Kultur Lokal Timor pada Tata Kelola Garis Depan NKRI-RDTL</b><br><i>Ignasius Usboko .....</i>                                                                              | <br><b>99</b>  |
| <br><b>Model Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien</b><br><i>Marisa S. B. Seran .....</i>                                                                                                                                                      | <br><b>113</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Implementasi Kebijakan Lintas Batas Indonesia dan Timor Leste dengan Pendekatan <i>Natural Language Processing</i>: Analisis Komprehensif dan Dampak Sosio-Ekonomi</b><br><i>Handrianus Nino &amp; Melkianus Suni</i> ..... | 123 |
| <b>Kebijakan Publik di Era Digital: Transformasi, Tantangan, dan Peluang</b><br><i>Medan Yonathan Mael</i> .....                                                                                                               | 145 |
| <b>Meretas Sekat Birokrasi melalui Kerja Sama antar Daerah di Perbatasan Indonesia-Timor Leste</b><br><i>Egidius Fkun</i> .....                                                                                                | 163 |
| <b>Gender dan Perbatasan</b><br><i>M. Angela Merici Siba</i> .....                                                                                                                                                             | 175 |
| <b><i>Unvisible Border</i>: Ketahanan Nasional dan Peran Pemerintahan Daerah dalam Menjaga Kedaulatan di Perbatasan NKRI-RDTL</b><br><i>Mariano Sengkoen</i> .....                                                             | 187 |
| <b><i>Collaborative Governance</i> dalam Upaya Penyelesaian Konflik Batas Negara</b><br><i>Yakobus Kolne</i> .....                                                                                                             | 203 |
| <b><i>Cross Border Trade</i> dan Fenomena Pasar Ilegal di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste</b><br><i>Ronaldus Nurak &amp; Remigius Seran</i> .....                                                                         | 215 |
| <b>Seni Menyaring Pemimpin: Eksplorasi Strategi Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh DPC PDIP Kabupaten Malaka</b><br><i>Fridus Bria &amp; Adeodata Laniria Charla Barros Mbiri</i> .....                                        | 227 |
| <b>Jalan Terjal Menuju Garis Akhir: Mengurai Problematika Penyelesaian Batas Darat Indonesia-Timor Leste</b><br><i>Yosef Serano Korbaffo</i> .....                                                                             | 239 |
| <b>PROFIL PENULIS</b> .....                                                                                                                                                                                                    | 253 |

# **ANTARA IDENTITAS NASIONAL DAN INTEGRASI GLOBAL: MENGANALISIS NASIONALISME INDONESIA DALAM DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER**

---

**Elpius Kalembang  
Bernardus Seran Kehik\***

Penelitian ini menganalisis dinamika nasionalisme Indonesia dalam kerangka integrasi global dan isu-isu politik terkini. Studi ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yang didasarkan pada tinjauan literatur untuk mengkaji evolusi nasionalisme Indonesia dari perlawanan terhadap kolonialisme menjadi adaptasi strategis dalam konteks globalisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia sangat penting untuk mempertahankan identitas nasional, namun harus berkembang untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh modernitas dan integrasi global. Perkembangan teknologi digital, media sosial, dan mobilitas global secara signifikan mempengaruhi manifestasi nasionalisme pada periode pascamodern. Nasionalisme Indonesia kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai alat ideologis untuk pembentukan bangsa, tetapi juga sebagai pendekatan dinamis untuk mengatasi kesulitan geopolitik dan perpecahan sosial. Dalam konteks ini, nasionalisme inklusif sangat penting untuk memperkuat kohesi sosial, namun nasionalisme eksklusif dapat memicu perselisihan identitas. Penelitian ini menyoroti nasionalisme sebagai konstruksi sosial yang dinamis dan adaptif yang menyeimbangkan pelestarian identitas nasional dengan tuntutan integrasi global.

## **Pendahuluan**

Dalam mengkaji seluk-beluk nasionalisme Indonesia dalam kerangka politik global dan postmodernisme, penting untuk mempertimbangkan bagaimana globalisasi telah membentuk kembali identitas dan kesetiaan nasional. Munculnya media digital, telah memfasilitasi gelombang nasionalisme baru yang sering kali bertentangan dengan gagasan tradisional tentang kedaulatan negara, seperti yang terlihat dalam lonjakan aktivisme daring yang melampaui batas geografis. Fenomena ini mencerminkan pergeseran ke arah pemahaman yang lebih cair tentang

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, A. (2018). NATIONALISM, NATION AWARENESS AND PAST IMAGINATION (A REFLECTIONS OF 65 YEAR HISTORY OF INDEPENDENT INDONESIA). *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 12(1), 22. <https://doi.org/10.17509/historia.v12i1.12115>
- Amrizal, A., & Hamdani, Z. (2022). A Brief Introduction of Indonesian Culture and Its National Identity to College Students in the University of Nueva Caceres. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 178–182. <https://doi.org/10.35877/454Rl.mattawang944>
- Cipta, S. E. (2020). Nationalism of History Education: A Perspective on Indonesian History Text Books. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.31764/ijeca.v3i1.2034>
- Cohen, M. I. (2022). Neither Civic nor Ethnic: Analyzing Right-Wing Politics Using a Theoretical Expansion of Kohn's "Dichotomy of Nationalism." *Journal of Nationalism, Memory & Language Politics*, 16(1), 1–22. <https://doi.org/10.2478/jnmlp-2022-0001>
- de Buck, D., & Hosli, M. O. (2020). *Traditional Theories of International Relations* (pp. 3–21). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-21603-0\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-21603-0_1)
- Fanany, I. (2018). Literary Nationalism in Indonesia: Modern literature and its Development. *Proceedings of the International Conference on Language, Literature, and Education (ICLLE 2018)*. <https://doi.org/10.2991/iclle-18.2018.4>
- Garner, R.-P. (2022). Nationalism. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.2039>
- Goode, J. P., & Stroup, D. R. (2015). Everyday Nationalism: Constructivism for the Masses\*. *Social Science Quarterly*, 96(3), 717–739. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12188>
- Goswami, M. (2020). Benedict Anderson, Imagined Communities (1983). *Public Culture*, 32(2), 441–448. <https://doi.org/10.1215/08992363-8090180>
- Jong, A. (2023). Modern episteme, methodological nationalism and the politics of transnationalism. *Frontiers in Political Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1172393>
- LEERSSEN, J. (2006). Nationalism and the cultivation of culture. *Nations and Nationalism*, 12(4), 559–578.

- <https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2006.00253.x>
- Madrohim, M., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). Pancasila Revitalization Strategy in the Era of Globalization to Face the Threat of National Disintegration. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(2).  
<https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.284>
- Madung, O. G. N., & Mere, W. S. (2021). Constructing Modern Indonesia Based on Pancasila in Dialogue with the Political Concepts Underlying the Idea of Human Rights. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.20258>
- Meng, L. Y., & Silva, M. De. (2022). The Roots and Evolution of Nationalism in Indonesia. *Akademika*, 91(3), 93–104.  
<https://doi.org/10.17576/akad-2021-9103-08>
- Mylonas, H. (2017). Nation-Building. In *International Relations*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199743292-0217>
- Nugroho, S. (2020). *Nationalism and the Making of Indonesian Subjects* (pp. 19–47). [https://doi.org/10.1007/978-981-15-4242-8\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-15-4242-8_2)
- Permadi, A. (2020). PERANAN GENERASI MILENIAL DALAM MELESTARIKAN BUDAYA MELALUI INFORMASI DIGITAL (The Role of Millennial Generation in Sustaining Culture Through Digital Information). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3621870>
- Rakhmanov, O. (2022). The phenomenon of populism in developed and transitional societies: features of manifestations and determinants. *Sociology: Theory, Methods, Marketing*, 2, 59–73.  
<https://doi.org/10.15407/sociology2022.02.059>
- Roberts, K. M. (2022). Populism and Polarization in Comparative Perspective: Constitutive, Spatial and Institutional Dimensions. *Government and Opposition*, 57(4), 680–702.  
<https://doi.org/10.1017/gov.2021.14>
- Saputro, I., Winarni, R., & Indriayu, M. (2021). The Implementation of Civic Education as a Means of Internalizing Nationalism to Primary School Students. *International Journal of Elementary Education*, 5(1), 131.  
<https://doi.org/10.23887/ijee.v5i1.33364>
- Saryono, D. (2017). MODEL PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI SEKOLAH DI PROVINSI JAWA TIMUR. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 1(1), 137–148.  
<https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2017.001.01.9>
- Schulze, H., Mauk, M., & Linde, J. (2020). How Populism and Polarization Affect Europe's Liberal Democracies. *Politics and Governance*, 8(3), 1–5. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i3.3460>

- Suargana, L., & Anggraeni Dewi, D. (2021). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM WAWASAN KEBANGSAAN DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 49–58.  
<https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5584>
- Tange, H., & Jenks, C. J. (2023). Nationalism: threat or opportunity to critical intercultural communication? *Language and Intercultural Communication*, 23(3), 221–228.  
<https://doi.org/10.1080/14708477.2023.2212488>
- Triandafyllidou, A. (2022). Contextualising nationalism. *Ethnicities*, 22(4), 573–588. <https://doi.org/10.1177/14687968221085260>
- Uba, K., & Bosi, L. (2022). Explaining youth radicalism as a positioning of the self at opposite extremes. *Politics*, 42(1), 128–145.  
<https://doi.org/10.1177/0263395721990539>
- Ungureanu, C., & Popartan, A. (2020). Populism as narrative, myth making, and the “logic” of politic emotions. *Journal of the British Academy*, 8s1, 37–43. <https://doi.org/10.5871/jba/008s1.037>
- Widiyono, S. (2019). Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi. *POPULIKA*, 7(1), 12–21.  
<https://doi.org/10.37631/populika.v7i1.24>

# MEMOTRET TANTANGAN DAN ISU *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA

---

Dian Festianto\*

*Good governance* merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu tata kelola pemerintahan di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi prinsip-prinsip *good governance* di era modern. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi pustaka dengan menggabungkan kajian literatur dan analisis dokumen kebijakan. Temuan menunjukkan, meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan reformasi birokrasi, seperti SP4N-LAPOR dan keterbukaan informasi publik, praktik tata kelola pemerintahan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Isu utama yang teridentifikasi meliputi tingginya tingkat korupsi, birokrasi yang lambat dan tidak efisien, rendahnya partisipasi substantif masyarakat, serta lemahnya integrasi digital antar instansi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan komitmen politik, percepatan transformasi digital pemerintahan, dan pembangunan budaya birokrasi yang *professional* sebagai strategi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi tata kelola yang lebih efektif dan adaptif di era disrupsi teknologi.

## Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan fondasi krusial bagi kemajuan dan stabilitas suatu negara, terutama di era modern yang ditandai dengan kompleksitas permasalahan dan dinamika perubahan yang pesat. Konsep ini tidak hanya terbatas pada sistem pemerintahan sebagai sebuah aktivitas, tetapi juga mencakup arah dan pengelolaan kebijakan yang berorientasi pada pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Jatmiko & Gusmayanti, 2022).

Di Indonesia, isu-isu seputar tata kelola pemerintahan menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. *Good governance* menjadi

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdou, A. M. (2021). *Good governance and COVID-19: The digital bureaucracy to response the pandemic (Singapore as a model)*. *Journal of Public Affairs*, 21(4). <https://doi.org/10.1002/pa.2656>
- Abror, F., & Khuljana, D. (2022). Upaya Merealisasikan *Good Governance* melalui Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(1), 55–59. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i1.381>
- Asmara, A. D., Gultom, A., Salam, R., & Handayani, N. (2022). PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA. *Jurna Imediasosian :Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 6(2), 259–276. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3163>
- Auliarahma, A., & Kartika, T. P. D. (2014). The effect of *good governance* on the success of the implementation of performance-based budgeting in Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Surabaya. *The Indonesian Accounting Review*, 4(2), 107–114. <https://doi.org/DOL: 10.14414/tiar.14.040202>
- Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, 22(1), 7–20. <https://doi.org/10.1080/713701144>
- Heeks, R. (2008). Benchmarking e-Government: Improving the national and international measurement, evaluation and comparison of e-Government. In *Evaluating information systems* (pp. 257–301). Routledge.
- Hood, C. (1991). A PUBLIC MANAGEMENT FOR ALL SEASONS? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Jatmiko, B., & Gusmayanti, D. (2022). The Effect of The Internal Control System, Leadership Style, Organizational Culture, Organizational Commitment, and *Good Government Governance* on The Performance of The Local Government (Survey on All SKPD in Magelang Regency). *Kinerja*, 26(2), 289–305. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v26i2.6115>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide *Governance* Indicators: Methodology and Analytical Issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(02), 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>

- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas :Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Ndraha, A. B., Waruwu, E., Zebua, D., & Zega, A. (2024). Kebijakan Kelembagaan Kehumasan Dan Jurnalistik Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 1(2), 23–31. <https://doi.org/10.70134/identik.v1i2.37>
- Neo, S., Grimmelihijsen, S., & Tummers, L. (2023). Core values for ideal civil servants: Service-oriented, responsive and dedicated. *Public Administration Review*, 83(4), 838–862. <https://doi.org/10.1111/puar.13583>
- OSBORNE, S. P., & BROWN, L. (2011). INNOVATION, PUBLIC POLICY AND PUBLIC SERVICES DELIVERY IN THE UK. THE WORD THAT WOULD BE KING? *Public Administration*, 89(4), 1335–1350. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.01932.x>
- Rosidi, V. C., & Sakuntalawati, L. R. D. (2022). ULAS: Ketercapaian Pelayanan Publik yang Efektif Berbasis Digital di Kota Surakarta. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 9(2), 177–205. <https://doi.org/10.22146/jps.v9i2.76232>
- Rusli, Z., & Muradi, M. (2013). Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(2), 101–218.
- Sato, T., Nahar, I., Anggara, R., & Sebastian, J. (2022). *Unleashing a digital transformation for equitable, high-quality education Indonesia's digital transformation* (pp. 1–12). KEARNEY. <https://www. Kearney.com/documents/291362523/292595022/Unleashing+a+digital+transformation+for+equitable+high-quality+education.pdf/37d97fb8-9289-960d-4b00-e4dcd8920857?t=1659443265000>
- Seno, R. H. (2020). Strategi Reformasi Administrasi dan Kepemimpinan Strategies Adminisnistrative Reforms and Leadership. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 113–122. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i2.1061>
- Throntveit, T. (2023). Public value governance. In *Elgar Handbook on Education Policy*, ed. Johnstone, Postiglione, and Teter (pp. 81–98). [https://www.academia.edu/97521191/Public\\_value\\_governance#los wp-work-container](https://www.academia.edu/97521191/Public_value_governance#los wp-work-container)

- Tobondo, Y. A., Juliana, S. F., Ruagadi, H. A., Tondowala, S. F. H., & Ngguna, Y. (2024). Analysis of Cybersecurity Implementation in Indonesia Based on the Framework of Administrative Law. *Interdisciplinary Journal (IDe)*, 2(2), 83–94.  
<https://doi.org/10.61254/idejournal.v2i2.55>
- Trisakti, F., Berliana, A. D. D., Al Bukhori, A. B., & Fitr, A. (2022). TRANSPARANSI DAN KEPENTINGAN UMUM. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 29–38.  
<https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>
- Wibisono, A. G. (2014). REVITALISASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, SERTA NEPOTISME. *LAW REFORM*, 10(1), 31–47. <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12455>
- Zarour, M., Alenezi, M., Ansari, M. T. J., Pandey, A. K., Ahmad, M., Agrawal, A., Kumar, R., & Khan, R. A. (2021). Ensuring data integrity of healthcare information in the era of digital health. *Healthcare Technology Letters*, 8(3), 66–77. <https://doi.org/10.1049/htl2.12008>

# **MANAJEMEN STRATEGIS PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI KEARIFAN LOKAL PASCA TRANSISI KEPEMIMPINAN DAERAH PADA WILAYAH PERBATASAN RI-RDTL DALAM MENDUKUNG ASTA CITA**

---

**Surya Yudha Regif  
Yohanes Imanuel Naif  
Andre Pattipeilohy\***

Pengentasan kemiskinan ekstrem di NTT, khususnya wilayah perbatasan, merupakan fokus utama pemerintah provinsi yang telah menunjukkan penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem dari 6,56% pada 2022 menjadi 3,93% pada 2023, dengan strategi utama meliputi penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan produktivitas, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Pasca transisi kepemimpinan daerah, manajemen strategis pengentasan ini menekankan pentingnya integrasi kearifan lokal sebagai pondasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program, agar solusi yang diterapkan sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk peran aktif kepala daerah dalam memimpin percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022, menjadi faktor kunci keberhasilan strategi ini. Sinergi kebijakan dan pelaksanaan program yang berkualitas, didukung oleh pemanfaatan kearifan lokal, memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di NTT di wilayah perbatasan RI-RDTL, sekaligus mendukung visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

## **Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap berbagai permasalahan sosial (Mood & Jonsson, 2016). Hal ini timbul dari ketidakmampuan individu dalam mempertahankan taraf hidup yang manusiawi sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abebe, A. H., & Gatisso, M. M. (2023). The role of indigenous knowledge regarding the history and building of the Kawo/King Amado Kella defensive wall in Wolaita, Ethiopia, including its significance and intended use. *Heliyon*, 9(11).  
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20990>
- Abel, Nooraeni, & Lestariningsih. (2023). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan Secara Langsung Dan Tidak Langsung Di Nusa Tenggara Timur*. <https://doi.org/10.5300/JSTAR.V3I01.43>
- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). *Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa*.
- Alisjahbana, A. Salsiah., & Murniningtyas, Endah. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia : konsep, target, dan strategi implementasi*. Unpad Press.
- Alsalloum, A. (2023). Preserving and Celebrating Syrian Intangible Cultural Heritage in the UK: Strategies, Insights, and Untold Narratives. *Heritage*, 6(10), 6718–6744.  
<https://doi.org/10.3390/heritage6100351>
- Asri Gita Pratiwi, D., Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Mk., Susiyanto, D., & Bhumi Jati Power, Mk. P. (2021). DIMENSIONS OF SOCIAL DEVELOPMENT IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY. In *Indonesian Journal of Social Work (IJSW)* (Vol. 5, Issue 1).
- Azly, M. (2023). *International Journal of Students Education POVERTY BECOME A SOCIAL PROBLEM THAT HAPPENED IN THE COMMUNITY*.
- Bahtiar, S. (2022). *Strengthening Performance and Strategic Management in Public Sector Organizations: A Case Study of Performance of Government Agencies in Sumedang District*.  
<https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5782>
- Bangsawan, G. (2024). Transforming Poverty Alleviation Policies: Adapting the Regional Innovation Architecture Approach. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 21–36. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.21-36>
- Braams, R. B., Wesseling, J. H., Meijer, A. J., & Hekkert, M. P. (2022). Understanding why civil servants are reluctant to carry out transition tasks. *Science and Public Policy*, 49(6), 905–914.  
<https://doi.org/10.1093/scipol/scac037>
- David, & David. (2017). *Strategic Management Concepts and cases*.

- Davis, E. P., & Sanchez-Martinez, M. (2015). *ECONOMIC THEORIES OF POVERTY*.
- Devarajan, S., & Khemani, S. (2016). *If Politics Is the Problem, How Can External Actors Be Part of the Solution?* <http://econ.worldbank.org>.
- Dirman, L. O. (2021). The Strategy for Poverty Alleviation Based on Local Wisdom in Buton Regency of Southeast Sulawesi. *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 26(1).  
<https://doi.org/10.9790/0837-2601084045>
- Djordjevic, B. (2021). THE NATURE OF STRATEGIC MANAGEMENT. *International Journal of Business Management and Economic Review*, 04(03). <https://doi.org/10.35409/ijbmer.2021.3272>
- Eze, V., Odoh, N., Igwe, O., & Mgbanya, C. (2019). Socio-economic factors influencing poverty among rural households in onicha local government area, ebonyi state, Nigeria. *International Journal of Agricultural Research, Innovation and Technology*, 9(1), 8–13.  
<https://doi.org/10.3329/ijarit.v9i1.42943>
- Figueres, C., & Background, \* 1. (2014). *INNOVATION AND TECHNOLOGY FOR POVERTY ERADICATION*.
- Fransori, A., & Haryanti, A. S. (2021). *INFLUENCE OF CREATIVE PROBLEM SOLVING MODEL INTERACTION AND LOCAL WISDOM APPROACH TO THE ABILITY TO PRODUCE LITERARY WORKS* (Vol. 5).  
<https://journal.unindra.ac.id/index.php/hortatori/index>
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Karo, K., & Yusnida, F. ; (2024). Causality Analysis Between Unemployment, Poverty, and Economic Growth in the Southern Sumatra Region. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 12.  
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1>
- Kouame, L. (2023). *“Progress, Gaps and Challenges in Eradicating Poverty and Building Resilience in Fragile and Humanitarian Contexts.”*
- Kristiono. (2017). *POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN BALI*.
- Kurniawan, H., Setiawan, R., Vladimirov Mladenov, S., & Ardiansyah, M. (2023). Sustainable Development Through Community Empowerment Based On Local Wisdom. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 41(2), 164–176.  
<https://idm.kemendesa.go.id/>

- Kusherdyana, R., & Muslim, S. (2024). Application of Sustainable Tourism. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 8(2), 132–145. <https://doi.org/10.34013/jk.v8i2.1504>
- Li, H., Shi, L., & Wen, K. H. (2024). Design-Driven Sustainable Poverty Alleviation: A Case Study of Precise Identification and Resource Optimization in Rural Areas. *Sustainability (Switzerland)*, 16(21). <https://doi.org/10.3390/su16219380>
- Maloma, I. (2016). THE SOCIOECONOMIC DETERMINANTS OF HOUSEHOLD POVERTY STATUS IN A LOW-INCOME SETTLEMENT IN SOUTH AFRICA. *Online) INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES*, 8(2), 1309–8063.
- Manshor, Z., Abdullah, S., & Hamed, A. B. (2020). Poverty and the Social Problems. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(3). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i3/7076>
- Maulana, A., Utami, C., & Hanafi, L. I. (2022). *THE PROGRESS OF REGIONAL AUTONOMY POLICY AND DEVELOPMENT ATTAINMENTS: INDONESIA'S EXPERIENCE (1999-2021)* (Vol. 19).
- Mood, C., & Jonsson, J. O. (2016). The Social Consequences of Poverty: An Empirical Test on Longitudinal Data. *Social Indicators Research*, 127(2), 633–652. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0983-9>
- Munoz Boudet, A. M., Buitrago, P., Leroy De La Briere, B., Newhouse, D., Matulevich, E. R., Scott, K., & Suarez-Becerra, P. (2018). *Gender Differences in Poverty and Household Composition through the Life-cycle A Global Perspective*. <http://econ.worldbank.org>.
- Murthi, N. (2023). *THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON POVERTY IN BALI PROVINCE*. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>
- Nengah Agus Tripayana, I., Bestari, P., Malihah, E., Handayani, N., Artinah, F., & Nikmah, K. (2024). ARTICLE INFO ABSTRACT. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 05.
- Ngole Bunga, E., & Haryanto, T. (2024). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2023*. 8(3).
- Obiora, & Faithful, S. (2019). *THE IMPACT OF LEADERSHIP AND GOVERNANCE ON POVERTY ALLEVIATION IN AFRICA*. <https://ssrn.com/abstract=3576621>

- Orliange, P. A. (2020). From poverty reduction to global challenges, a new horizon for international development cooperation? *Revista Brasileira de Política Internacional*, 63(2), 1–26.  
<https://doi.org/10.1590/0034-7329202000202>
- PARI. (2021). *ACCESS TO BASIC SERVICES ENABLING PROGRESSIVE TRANSFORMATION OR ENTRENCHING POVERTY AND INEQUALITY?*
- Pemerintah Provinsi NTT. (2024). *IV-1 RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026*.
- Pertiwi, P. R., & Mardiana, R. (2020). Dinamika Awig-Awig dan Pengaruhnya terhadap Keberlanjutan Tanah Adat. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 125–136.  
<https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.125-136>
- Poister, T. H., Pitts, D. W., & Edwards, L. H. (2010). Strategic management research in the public sector: A review, synthesis, and future directions. *American Review of Public Administration*, 40(5), 522–545.  
<https://doi.org/10.1177/0275074010370617>
- Possumah, B. T., Muhammad, Z., Padli, J., Abu Talib, J., & Shah, K. Md. (2018). Local Knowledge, Public Policy and Poverty Reduction: A Review on Indonesia Experiences. *SHS Web of Conferences*, 45, 04002. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20184504002>
- Putri Ramadhani, S., Risdalina, S., & Pembangunan Nasional Jawa Timur, U. (2024). *Proceeding of IROFONIC 2024 “Strengthening Partnership for Sustainable Development” The Impact of International Cooperation Policies on Poverty Reduction and Sustainable Development in Developing Countries: A Case Study of Indonesia*.
- Raharusun, F., Simangunsong, F., & Pitono, A. (2023). *Policy implementation the transition period: A case study at Tangerang*.
- Ramphoma, S. (2014). *UNDERSTANDING POVERTY: CAUSES, EFFECTS AND CHARACTERISTICS*.
- Rank, M. R., Yoon, H.-S., & Hirschl, T. A. (2003). American Poverty as a Structural Failing: Evidence and Arguments. *The Journal of Sociology & Social Welfare*, 30(4). <https://doi.org/10.15453/0191-5096.2936>
- Ruhana, F., Syafril Nasution, M., & Sutiapermana, A. (2024). Combating Poverty and Social Inequality in 2023 a Global Imperative for Equitable Development and Social Justice. In *International Journal of Science and Society* (Vol. 6, Issue 1). <http://ijsoc.goacademica.com>
- Ruja, I. N., & Idris, I. (2023). *Poverty Reduction Based on Local Wisdom: a Qualitative Approach* (pp. 129–139). [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-168-5\\_12](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-168-5_12)

- Soedigdo, D., Harysakti, A., & Usop, T. B. (2014). *ELEMEN-ELEMEN PENDORONG KEARIFAN LOKAL PADA ARSITEKTUR NUSANTARA*. <http://seratcenthini.wordpress.com/2009/11/09/ugm-launching-buku-saduran-serat-centhini-jilid-v-xxii/>
- Suryahadi Athia Yumna Umbu Reku Raya Deswanto Marbun, A. (2010). *Review of Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, and Programs in Indonesia*.
- TNP2K. (2014). *Reaching Indonesia's Poor and Vulnerable and Reducing Inequality*.
- Umbu Djuma Mone Mangi, A. (2023). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN, INFLASI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI NTT. 20, 2. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>
- Woyo, E., & Musavengane, R. (2023). Has Community-Based Tourism Been a Useful Tool for Poverty Eradication in Southern African Rural Destinations? *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 12(2), 521–534. <https://doi.org/10.46222/ajhtl.19770720.383>
- Yudhistira, I., Prawata Hadi, S., & Prabawani, B. (2023). Synchronizing Poverty Alleviation Strategy: Lesson Learned from Central Java, Indonesia. *JURNAL ILMU SOSIAL*, 22(1), 19–43. <https://doi.org/10.14710/jis.22.1.2023.19-43>

# AKSESIBILITAS PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE

---

**Verawati Skaut\***

Batas negara memiliki peran yang penting karena berfungsi sebagai wajah atau pintu masuk suatu negara. Indonesia mempunyai perbatasan darat dan laut dengan sepuluh negara tetangga, salah satunya adalah Timor Leste. Dalam konteks perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah Provinsi yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Timor Leste. Wilayah perbatasan NTT ini merupakan area baru setelah kemerdekaan Timor-Timur pada tahun 2002. Permasalahan yang timbul di daerah perbatasan RI-RDTL saat ini cenderung berasal dari aspek sosial ekonomi. Belum jelasnya batas wilayah laut masing-masing negara menyebabkan penangkapan ikan baik oleh nelayan RI maupun nelayan RDTL masih sering memasuki wilayah laut negara yang berbatasan. Kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah perbatasan perlu disesuaikan dengan kondisi terkini untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mengenai kawasan perbatasan dengan terlebih dahulu menganalisis masalah aksesibilitas yang terjadi di lapangan. Secara keseluruhan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste dalam peningkatan aksesibilitas di wilayah perbatasan dinilai positif, dengan komitmen untuk terus mempererat kerja sama diberbagai sektor seperti, sosial, pendidikan, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan meskipun belum terwujud secara maksimal sehingga perlu adanya peningkatan serta kontrol dari kedua negara ini untuk terus mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

## **Pendahuluan**

Suatu negara bisa disebut merdeka dan berdaulat jika memiliki faktor eksistensial yang disebut wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu (*a defined territory*). Indonesia merupakan negara yang secara geografis memiliki wilayah tertentu yang bukan saja merupakan sebuah benua atau daratan, namun juga sebagai negara yang memiliki wilayah atau dimensi nasional yang merupakan kesatuan dari tiga dimensi wilayah yakni darat,

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, N. S. (2024). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pelayanan Sosial Di Kecamatan Ckarang Barat Kabupaten Bekasi*. 2024-03-07, 14–56.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (15/03/2025). Daftar Pustaka: Sumber elektronk (publikasi web). Diakses 20 Juli 2025 dari <https://bnpp.go.d/berta/memakna-hubungan-bilateral-Timor-leste-dan-Indonesia>
- Bara Lay, J. R. B., & Wahyono, H. (2018). Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain Pada Kawasan Perbatasan RI-RDTL D Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 14(1), 29. <https://do.org/10.14710/pwk.v141.18246>
- Citrana, N. B. (2024). *RNGKASAN DSERTAS OF INDONESIA AND TIMOR LESTE LAND BOUNDARES*. 50(2), 317–328. <https://do.org/10.55981/jm.2024.8846>
- Dawa, P. R., Arman, Y., Kanddo, Z., Kolo, V., & Gan, K. R. (2024). Kebijakan Perbatasan Dan Dplomas Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Kajan Imah nterdsplner*, 8(7), 2118–7303. <https://oaj.jurnalhst.com/ndex.php/jk/artcle/vew/1432>
- Johnson Kennedy, P. S., L.Tobng, S. J., L.Toruan, R., & Tampubolon, E. (2019). Analss Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antara Provinsi Maluku Dan Negara Timor Leste. *Prosdng Semnar Nasional Pakar*, 1–6. <https://do.org/10.25105/pakar.v00.4318>
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sans dan Teknologi. (21/02/2025). Daftar Pustaka: Sumber elektronk (publikasi web). Diakses 20 Juli 2025 dari <https://kemdiktsaintek.go.d/kabar-dkt/kabar/mendiktsaintek-snergkan-kerjasama-bilateral-lebih-lanjut-dengan-Timor-leste/>
- Kementerian Koordnator Bidang Politik dan Keamanan. (11/06/2025). Daftar Pustaka: Sumber elektronk (publikasi web). Diakses 20 Juli 2025 dari <https://polkam.go.d/kunjung-Timor-leste-Indonesia-om-sampakan-kerja-sama-mgras-dalam-format-trilateral/>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (21/01/2019). Daftar Pustaka: Sumber elektronk (publikasi web). Diakses 20 Juli 2025 dari <https://portal.dephub.go.d/post/read/tingkatkan-sektor-transportasi-kedua-negara,-menhub-tandatangan-mou-dengan-Timor-leste>

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (27/02/2025). Daftar Pustaka: Sumber elektronk (publikasi web). Diakses 20 Juli 2025 dari <https://www.kemhan.go.d/2025/02/27/menhan-ri-Indonesia-tegaskan-dukung-penuh-keanggotaan-Timor-leste-d-asean.html>
- Kemhan. (n.d.). *Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI-RDTL*. <https://www.kemhan.go.d/strahan/wp-content/uploads/mgras/Produk/penanganan-wilayah-perbatasan-maritim-RI-RDTL.pdf#:~:text=13>. Kondisi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim R,V / 1978 tentang ntegras Timor Timur.
- Kompas.com. (16/08/2023). Daftar Pustaka: Sumber elektronk (publikasi web). Diakses 22 Juli 2025 dari <https://regional.kompas.com/read/2023/08/16/203410678/wajah-plbn-motaain-akses-indonesia-ke-timor-leste?page=all>
- Korbaffo, Y. S. (2013). *Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dalam Pendekatan Non-Tradisional*. 1–27. [https://repostory.unar.ac.d/80049/3/JURNAL\\_TH.10 18 Kor k.pdf](https://repostory.unar.ac.d/80049/3/JURNAL_TH.10%2018%20Kor%20k.pdf)
- Mara Vaney Gunu Gokok, Tant Nurgyant, Dansar Solhah Amn, & Yeyen Suband. (2023). Peran Pos Lintas Batas Negara Motamasin dalam Mengatas mgran legal d Wilayah Perbatasan RI-RDTL. *SOSMANORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humanora*, 2(1), 54–59. <https://do.org/10.55123/sosmanora.v2i1.1695>
- Sabaat, Y. Y. (2016). *Penyelesaian Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dalam Konteks Politik Tata Ruang*. 1–23. [https://repostory.unar.ac.d/70886/3/JURNAL\\_TP.02 18 Sab s.pdf](https://repostory.unar.ac.d/70886/3/JURNAL_TP.02%2018%20Sab%20s.pdf)
- Setkab. (26/01/2024). Daftar Pustaka: Sumber elektronk (publikasi web). Diakses 20 Juli 2025 dari <https://setkab.go.d/empat-kesepakatan-kerja-sama-Indonesia-dan-Timor-leste/>
- Taena, G., Susu, T., Servatus, R., Katolk, U., & Kupang, W. M. (2025). Manfaat Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Bag Masyarakat Desa Napan Wilayah Perbatasan RI-Rdtl Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Imah Kajian Multdsplner*, 9(5), 2118–7302.
- Tefa, G., & Thaal, F. P. (2019). Knerja Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Terpadu Wini D Kawasan Perbatasan R-Rdtl Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publk (JP Dan KP)*, 11–24. <https://do.org/10.33701/jpkp.v1i1.711>

Vinsensius Tamelab, Merciana Yulita Fn Tae, Yohanes Arman, & Yustinus Pedo. (2023). Urgensi Kerja Sama Tentara Nasional Indonesia Dan Forcas Defese Timor Lorosae Dalam Penanggulangan Perdagangan legal Lintas Batas Antara Indonesia Dan Timor Leste. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 156–172.  
<https://do.org/10.58192/populer.v23.1208>

# **SUARA FETO, ARAH DESA: MEMBACA PEMBANGUNAN DARI PERSPEKTIF PEREMPUAN SEBAGAI NARASI TRANSFORMASI GENDER DI WILAYAH ADAT DAWAN**

---

**Handrianus Vianey Melin Wula  
Fransiskus Atok\***

Perempuan kerap ditempatkan dalam posisi yang dihormati secara simbolik dalam budaya lokal. Namun, di balik penghormatan itu, realitas sosial sering kali menunjukkan ketimpangan dalam pembagian kekuasaan dan tanggung jawab. Tulisan ini mengulas bagaimana peran perempuan mengalami transformasi dalam proses pembangunan desa, dengan mengambil studi kasus di Desa Subun Bestobe, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Melalui pendekatan kualitatif dan studi lapangan, tulisan ini menelusuri keterlibatan perempuan dalam berbagai tahapan Pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan melalui peran mereka di lembaga-lembaga lokal seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, dan kelompok usaha. Hasil kajian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Namun demikian, keterwakilan mereka dalam struktur kekuasaan formal masih tergolong minim, sementara beban ganda antara peran domestik dan publik terus menjadi tantangan utama. Tulisan ini menekankan pentingnya peran kelembagaan lokal sebagai meso institusi yang dapat menjadi ruang bagi perempuan untuk memperkuat kapasitas sosial dan posisi tawar mereka dalam masyarakat. Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan perlunya afirmasi kebijakan, perubahan norma-norma budaya yang membatasi, serta integrasi perspektif gender secara menyeluruh dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa.

## **Pendahuluan**

### **Menggugat Pinggiran: Perempuan, Perbatasan, dan Pembangunan Desa**

Wilayah perbatasan kerap dipandang sebagai simbol kehadiran negara di titik terluar, namun pada saat yang sama menyimpan ironi yang mendalam: justru di sanalah ketimpangan dan ketertinggalan paling nyata

## DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, H. (2018). *Gender and Patriarchy Issues in Women's Village Leadership and Women's Village Apparatus Domination in Plantation Community of North Sumatra*.
- Felina Marthina Timpal, S. S. H. T. R. S. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DI PULAU MIANGAS DENGAN PENDEKATAN KESEJAHTERAAN. *JSS Jurnal Social Science*, 12(1), 37–46.
- Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(4), 343–356. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567>
- Hulahi, E., Kulsum, U., Fitriani, F., Rahmawati, D. E., & Husein, R. (2022). The Role of the Government of Indonesia in Handling Cases of Sexual Violence Against Women. *Journal of Governance*, 7(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i1.14143>
- Iskandar, D., & R. T. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung Pembangunan Berbasis Kebutuhan Lokal. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 18(2), 25–40.
- Ismail, A., Torro, S., Umar, F., Irwansyah, I., & Hardiyanti Arhas, S. (2024). Role and Political Strategy of Women Village Heads in Development of Rural Politics. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14895>
- Kushandajani, K. (2019). Social and Economic Empowerment for Village Women as a Strategy of Village Development. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.14710/ijpd.4.1.1-6>
- Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. (2010). New institutionalism through a gender lens: Towards a feminist institutionalism? *International Political Science Review*, 31(5), 573–588. <https://doi.org/10.1177/0192512110388788>
- Mansuri, G., & Rao, V. (2012). *Localizing Development*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-1>
- Noer, K. U., Chadijah, S., & Rudiati, E. (2021). There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia. *Heliyon*, 7(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08552>
- Pike, A., R.-P. A., & T. J. (2016). Local and regional development in practice. In *Local and Regional Development* (pp. 257–314). Routledge.

- <https://doi.org/10.4324/9781315767673-8>
- Saherimiko. (2014). Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat (Dalam Perspektif Ekonomi Politik). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 19(1), 55–64.
- Susanti, E., & Monica, D. R. (n.d.). *The Model of Handling Cases of Violence Against Women Based on Local Wisdom of Lampung People*.
- Syam, A., M. A., & A. F. (2022). *Good Governance* dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Implementasi Partisipasi Masyarakat.. *Jurnal Pembangunan Dan Tata Kelola*, 17(2), 45–59.
- Wijaya, A. F., Andryanto, D., & Wike, W. (2020). Managing Women's Village Activists Participation in Village Development Planning. *Journal of Governance*, 5(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v5i2.8915>
- Wróblewski, Ł., & Kasperek, A. (2019). Euroregion as an entity stimulating the sustainable development of the *cross-border* market for cultural services in a city divided by a *border*. *Sustainability (Switzerland)*, 11(8). <https://doi.org/10.3390/su11082232>

# **BUDAYA POLITIK MASYARAKAT EKS TIMOR TIMUR DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA: STUDI KASUS DI KECAMATAN BIKOMI NINULAT**

---

**Yosef Kristoforus Taekab  
Heribertus Binsasi\***

Tulisan ini mengkaji budaya politik masyarakat eks Timor Timur yang bermukim di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan fokus studi kasus di Kecamatan Bikomi Nilulat. Masyarakat ini merupakan bagian dari diaspora pasca jajak pendapat tahun 1999 yang memilih tetap menjadi warga negara Indonesia setelah lepasnya Timor Timur dan berdirinya negara Timor Leste. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, karakteristik, dan dinamika budaya politik yang berkembang di tengah masyarakat eks Timor Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan menggunakan pendekatan teoritis dari Gabriel Almond dan Sidney Verba mengenai tipologi budaya politik (parokial, kaula, dan partisipan), tulisan ini menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat eks Timor Timur cenderung berada pada pola parokial-subjektif, dengan ketergantungan tinggi pada tokoh tradisional, figur informal, dan relasi patron-klien. Namun, terdapat indikasi transformasi menuju budaya politik partisipatif, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terdidik. Dinamika ini dipengaruhi oleh pengalaman historis, nilai-nilai adat, isolasi geografis, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta informasi politik. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan strategi penguatan demokrasi lokal dan pembangunan masyarakat perbatasan yang inklusif dan partisipatif.

## **Pendahuluan**

Masyarakat eks Timor Timur merujuk pada warga negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Timor Timur (sebelum menjadi negara Timor Leste pada tahun 2002) dan memilih tetap tinggal atau pindah ke wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah jajak

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hoogerwerf, *Politikologi*, Jakarta: Erlangga, 1985
- Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Anwar, Dewi Fortuna. 2013. *The Timor Gap: Refugee Issues and Indonesia's Border Policy*. Dalam *Indonesia's Transformations*, disunting oleh Marcus Mietzner. Singapore: ISEAS.
- Aspinall, Edward, dan Mada Sukmajati, ed. 2016. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov UGM & Kementerian Luar Negeri Norwegia.
- Erawan, I Ketut Putra. 2017. *Identitas, Nasionalisme, dan Batas Negara: Studi Kasus di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste*. *Jurnal Masyarakat & Budaya* 19, No. 1.
- Hedman, Eva-Lotta E.2008. *Conflict, Violence, and Displacement in Indonesia*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Kammen, Douglas. 2015. *Three Centuries of Conflict in East Timor*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Kingsbury, Damien. 2007. *East Timor: The Price of Liberty*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lay, Cornelis. 2016. *Politik Transaksional di Indonesia: Realitas dan Tantangan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Milal, Aloysius. 2017. *Politik Lokal dan Gereja: Refleksi Gerejawi atas Demokrasi di NTT*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mulyanto, Dede. 2019. *Budaya Diam dan Trauma Sosial Masyarakat Pasca-Konflik*. *Jurnal Politik dan Kemanusiaan* 5, No. 2.
- Nuring, Benny R. 2021. *Budaya Politik Masyarakat Eks Timor Timur di NTT: Kajian Partisipasi Politik Pasca Referendum*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 23, No. 2
- Pudjiastuti, Tri Nuke. 2017. *Masyarakat Perbatasan: Dinamika Sosial dan Politik di Wilayah Tapal Batas Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Robinson, Geoffrey. 2010. *If You Leave Us Here, We Will Die: How Genocide Was Stopped in East Timor*. Princeton: Princeton University Press.
- Sidel, John T. 2006. *Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Soares, Maria. 2016. *Trauma dan Transisi Politik dalam Komunitas Eks Timor Timur*. *Jurnal Antropologi Indonesia* 37, No. 1

# **POLITIK YANG MEMBUMI DI PERBATASAN: PRAKTIK MANAJEMEN POLITIK ADAPTIF DALAM KULTUR LOKAL TIMOR PADA TATA KELOLA GARIS DEPAN NKRI–RDTL**

---

**Ignasius Usboko\***

Tulisan ini membahas bagaimana praktik manajemen politik adaptif berkembang dalam kultur lokal masyarakat Timor khususnya Kabupaten Timor Tengah Utara di wilayah perbatasan NKRI–RDTL. Permasalahan utama yang diangkat adalah ketimpangan antara pendekatan tata kelola negara yang birokratis, cenderung prosedural “*one man one vote*” dalam penentuan pemimpin dan realitas politik lokal yang berbasis adat. Studi ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan legitimasi tidak hanya dijalankan melalui struktur formal, tetapi juga melalui mekanisme sosial seperti *natoni*, *tok tabua-tamolok tabua* dan relasi *umane-fetosan* atau *laes matsaos atone-bife* dengan memadukan kerangka *hybrid governance*, *legal pluralism*, dan *adaptive governance*. Temuan utama memperlihatkan bahwa masyarakat perbatasan memiliki sistem politik yang adaptif, deliberatif, dan kontekstual, yang mampu menjawab dinamika negara sekaligus menjaga kohesi sosial. Naskah ini menegaskan perlunya kebijakan publik yang berpijak pada praktik lokal yakni politik yang membumi sebagai instrumen menuju tata kelola perbatasan yang lebih sah, inklusif, dan berkelanjutan. Akhirnya studi ini menawarkan model konseptual untuk merumuskan kebijakan berbasis komunitas di wilayah dengan pluralitas otoritas dan nilai.

## **Pendahuluan**

### **Politik Membumi: Kekuasaan yang Bertumpu pada Nilai Lokal**

Diskursus tentang pembangunan nasional dalam konteks wilayah perbatasan acap kali dilihat sebagai “pinggiran strategis” yang harus dijaga dan dibangun dari perspektif pertahanan serta birokrasi administratif. Namun, bagi masyarakat Timor bagian tengah utara, perbatasan bukan sekadar garis pemisah, melainkan ruang hidup yang mengandung nilai, ritus, dan struktur sosial yang khas. Kekuasaan tumbuh dari akar komunitas di wilayah ini bukan semata dari struktur negara. Politik dijalankan melalui

## DAFTAR PUSTAKA

- Bedner, A. (2016). *Indigenous Rights and Legal Pluralism in Indonesia: Recognizing Plurality*. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 48(3), 312–337.  
<https://doi.org/10.1080/07329113.2016.1219585>
- Binsasi, H. (2022). Budaya Atoni Pah Meto Dalam Resolusi Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Mandar: *Social Science Journal*, 1–10.
- Boy, M. V. (2021). *Biboki, Sebuah Kerajaan “Bufferzone”*. Fakultas Filsafat, Unwira. Diakses dari <https://gardaindonesia.id/2021/06/biboki-sebuah-kerajaan-bufferzone/>
- Chaffin, B. C., Gosnell, H., & Cosens, B. A. (2014). *A Decade of Adaptive Governance Scholarship: Synthesis and Future Directions*. Ecology and Society, 19(3), 56. <https://doi.org/10.5751/ES-06824-190356>
- Cosens, B., Craig, R. K., Hirsch, S. L., Arnold, C. A., Benson, M. H., DeCaro, D. A., & Garmestani, A. S. (2017). *The Role of Law in Adaptive Governance*. Ecology and Society, 22(1), 30.  
<https://doi.org/10.5751/ES-08731-220130>
- Faundez, J., & Merry, S. E. (2021). *The Practice of Human Rights: Tracking Law Between the Global and the Local*. Cambridge University Press.
- Foucault, M. (1976). *The history of sexuality, Vol. 1: An introduction*. New York: Pantheon Books.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, Trans.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Hadi, K. (2018). Legitimasi Kekuasaan dan Hubungan Penguasa-Rakyat Dalam Pemikiran Politik Suku Dayak Ma’anyan. *Jurnal Kawistara*, 8(1), 46–60. <https://doi.org/10.22146/kawistara.28082>
- Hansen, T. B., & Stepputat, F. (2006). Sovereignty Revisited. *Annual Review of Anthropology*, 35, 295–315.  
<https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123317>
- Kolne, Y. (2014). Implementasi Perjanjian Perbatasan RI – RDTL Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan (Studi kasus di Kabupaten TTU – RI dengan Distrik Oecusse – RDTL). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 5(1), 1–14.
- McWilliam, A. (2007). *Harbouring tra~Ditions: Timorese Cultural Reflections of East Timor’s Political Past*. *Anthropological Forum*, 17(1), 55–72.

- McWilliam, A. (2012). Anthropology and *Border Studies*: A View from the Periphery. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 14(2), 135–149.
- Meagher, K., De Herdt, T., & Titeca, K. (2014). *Unravelling Public Authority: Paths of Hybrid Governance in Africa*. Development and Change, 45(5), 1187–1203. <https://doi.org/10.1111/dech.12110>
- Millar, G. (2018). *Reclaiming the State: Overcoming Problems of Knowledge and Power in the Security Sector Reform*. Contemporary Security Policy, 39(1), 140–160. <https://doi.org/10.1080/13523260.2017.1341775>
- Molnar, A. K. (2010). *Timor-Leste: Politics, History, and Culture*. Routledge.
- Neonbeni, R. V., Binsasi, H., & Faot, N. B. (2023). Fenomena Kekerabatan Masyarakat Adat Atoen Meto Pah Timor Kabupaten Timor Tengah Utara dan Masyarakat Adat Enclave Oecusse – RDTL. *Journal of Education Science: Fondation and Application (JESFA)*, 2(1), 1–12.
- Nordholt, H. G. S. (1971). *The Political System of the Atoni of Timor*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Partnership for Governance Reform. (2011). *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia* (Policy Paper No. 2/2011). Jakarta: Partnership.
- Raharjo, S. N. I. (2014). Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan warga Distrik Oecussi, Timor Leste pada 2012–2013. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Rodan, G., & Hughes, C. (2014). *The Politics of Accountability in Southeast Asia: The Dominance of Moral Ideologies*. Oxford: Oxford University Press.
- Rusmiyati, R., et al. (2022). *Manajemen Perbatasan*. Jakarta: Kemenko Polhukam & FISIPOL UGM.
- Sianipar, I. M. J. (2017). Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste. *Prosiding Vinnas AIHII*, 1–10.
- Soares, D. B. (2006). *The Power of the Past: Timor-Leste and the Politics of Tradition*. *Indonesia*, 81, 35–48. <https://doi.org/10.1353/ind.2006.0013>
- Sugiarti, A. (2018). Strategi Adaptasi Budaya Komunitas Adat Perbatasan di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste [Skripsi, Universitas Airlangga].
- Syarwi, P. (2022). Diskursus Teori dan Praktik Model Demokrasi Konsensus di Indonesia. *Jurnal Communitarian*. 3(2), 450–473
- Therik, T. (2004). *Wehali: The Female Land – Traditions of a Timorese Ritual Centre*. Canberra: ANU Press.

- Usboko, I., Tiza, A.L., Naif, Y.I. (2020). Institusionalisasi Demokrasi Konsensus Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tun'noe Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Poros Politik*. 24-30
- Usfinit, A. U. (2003). *Maubes Insana: Salah Satu Masyarakat Timor Dengan Struktur Adat Unik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wedeen, L. (2009). *Peripheral Visions: Publics, Power, and Performance in Yemen*. Chicago: University of Chicago Press.
- Windiarti, D. (2017). Tradisi, Agama, dan Modernisasi Dalam Perkembangan Kebudayaan Timor. Kupang: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Nusa Cendana.

# **MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**

---

**Marisa S. B. Seran\***

## **Pendahuluan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing untuk setiap daerah perlu juga untuk memperhatikan beberapa prinsip seperti: prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keunikan yang ada pada suatu daerah yang ada di sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam, manusia dan sumber daya buatan yang dimiliki guna penciptaan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana meningkatkan pengelolaan fiskal. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah ada beberapa aspek kinerja keuangan yang dituntut, yaitu: Aspek Pertama, Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Aspek kedua Pengelolaan pendapatan daerah harus dapat dilakukan secara efektif, efisien, serta akuntabel khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Aspek Ketiga, Pengelolaan belanja daerah harus sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan prinsip efisiensi serta efektivitas. Aspek Keempat, Pengelolaan pembiayaan daerah harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk menghindari risiko keuangan daerah. Aspek Kelima, Pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban ini harus diaudit oleh Badan

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusfin, 2012. <http://blankon4605.wordpress.com/2012/11/27/reformasi-manajemen-keuangan-daerah/>
- FGD Hukum Keuangan Negara (3 November 2023)
- Itok, 2009. *Transparansi dan Efisiensi Keuangan Daerah*.
- Laode Syarif, 2014. <http://gagasanpamong.blogspot.co.id>
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (1st Ed.). Andi.
- Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:  
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/sejarah-reformasi-pengelolaan-keuangan-negara-333fc7c2/detail/>
- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Worldbank, 2008. *Manajemen Keuangan Daerah. Kajian Pengeluaran Publik 2007*.

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINTAS BATAS INDONESIA DAN TIMOR LESTE DENGAN PENDEKATAN *NATURAL LANGUAGE PROCESSING*: ANALISIS KOMPREHENSIF DAN DAMPAK SOSIO-EKONOMI

---

Handrianus Nino  
Melkianus Suni\*

Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif mengenai implementasi kebijakan lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste, dengan fokus pada identifikasi area kebijakan utama, tantangan yang dihadapi, dan dampak sosio-ekonomi terhadap komunitas perbatasan. Pendekatan *Natural Language Processing* (NLP) digunakan sebagai metodologi untuk mengekstraksi pemahaman mendalam dari sejumlah besar data tekstual tidak terstruktur, termasuk dokumen resmi, laporan berita, dan publikasi penelitian. Temuan menunjukkan bahwa warisan demarkasi kolonial terus membentuk dinamika perbatasan modern, menciptakan ketegangan antara kerangka kebijakan formal dan realitas lokal. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara diplomasi tingkat tinggi dan penerimaan di tingkat komunitas, yang sering kali memicu resistensi. Pengelolaan perbatasan juga menghadapi tantangan ganda antara penegakan kedaulatan dan fasilitasi kerja sama ekonomi. Aktivitas ilegal, yang didorong oleh disparitas ekonomi, menyoroti perlunya pendekatan holistik yang melampaui langkah-langkah keamanan semata. Penelitian ini merekomendasikan strategi pengelolaan perbatasan yang lebih inklusif, harmonisasi kebijakan keamanan dan pembangunan, intervensi ekonomi yang ditargetkan, dan pemanfaatan NLP secara berkelanjutan untuk pemantauan dan evaluasi kebijakan yang adaptif.

## Pendahuluan

Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste lebih dari sekadar garis geografis; ia merupakan kompleks antarmuka yang dibentuk oleh sejarah panjang, termasuk warisan kolonial Belanda dan Portugis. Traktat Lisbon tahun 1859 dan keputusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada

## DAFTAR PUSTAKA

- Binsasi, H. (2022). Budaya Atoni Pah Meto dalam Resolusi Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia dan Timor Leste. *MANDAR: Social Science Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.31605/mssj.v1i1.1673>
- Binsasi, H., & Korbaffo, Y. S. (2019). Jurnal Poros Politik ISSN : 2528-0953 Alasan Masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat Menolak Penyelesaian Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste di titik Un-Surveyed Segment Jurnal Poros Politik ISSN : 2528-0953. *Poros Politik*, 3(Sosioal Humaniora), 25–31.
- Binsasi, H., Seran, R., & Nino, H. (2024). SOCIAL INTERACTION BETWEEN THE COMMUNITIES OF THE EX-EAST TIMOR AND LOCAL COMMUNITIES IN THE BORDER AREAS OF INDONESIA AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR LESTE IN THE DISTRICT OF NORTH. *Proceeding of The Sunan Ampel International Conference of Political and Social Sciences (SAICoPSS), Faculty of Social and Political Sciences UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2, 84–91.
- BPPD NTT. (2024). *Pos Lintas Batas Negara Indonesia dan Timor Leste*. Pemerintah Provinsi NTT. <https://www.bppd.nttprov.go.id/>
- Fatina, C. (2025). Timor Leste dan Indonesia Sepakati MoU Kerjasama dalam bidang perdagangan. *Agencia Noticiosa de Timor Leste*, 1–4. <https://id.tatoli.tl/2024/10/11/timor-leste-dan-indonesia-sepakati-mou-kerjasama-bidang-pembangunan/>
- Irum Naz Sodhar, Akhtar Hussain Jalbani, Abdul Hafeez Buller, A. A. M. and, & Sodhar, A. N. (2020). *Natural Language Processing: Applications, Techniques and Challenges* (Anam Naz Sodhar (ed.); VII, Issue August). Department of Satpriya Group of Institutions, Rohtak, Haryana, India. [https://www.researchgate.net/profile/Petro-Trokhimchuck-2/publication/343981699\\_S\\_Beer\\_Centurial\\_Problem\\_in\\_Cybernetics\\_and\\_Methods\\_of\\_its\\_Resolution\\_p87-117/links/5f4be8d8458515a88b8f31c9/S-Beer-Centurial-Problem-in-Cybernetics-and-Methods-of-its-Resolut](https://www.researchgate.net/profile/Petro-Trokhimchuck-2/publication/343981699_S_Beer_Centurial_Problem_in_Cybernetics_and_Methods_of_its_Resolution_p87-117/links/5f4be8d8458515a88b8f31c9/S-Beer-Centurial-Problem-in-Cybernetics-and-Methods-of-its-Resolut)
- Kalembang, E., & Korbaffo, Y. S. (2022). Non-State Actors' Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective. *Jurnal Global & Strategis*, 16(1), 51–74. <https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.51-74>

- Meulman, N., Sprenger, S. A., Schmid, M. S., & Wieling, M. (2023). Research Methods in Applied Linguistics. *Elsevier*, 2(3), 100079.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rmal.2023.100079>
- Neonbeni, R. V., Apaut, Y. C., & Loin, A. W. (2023). Fenomena Kekerabatan Masyarakat Adat Atoen Meto Pah Timor Kabupaten Timor Tengah Utara dan Masyarakat Adat Enclave Oecusse-RDTL Randy Vallentino Neonbeni Aprianus Wilsontro Loin. *Journal of Education Sciences: Fondation & Application (JESFA)*, 2(1), 1–23.  
<https://jesfa.umbulukumba.ac.id/index.php/jesfa>
- Nino, H. (2018). Ruang Konflik di Area Tapal Batas Indonesia-Timor Leste : Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse. *Brawijaya Journal Of Social Science*, 2(2), 92–100.  
<https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrbsb.2018.002.2.07>
- Nino, H., Seran, R., & Binsasi, H. (2025). Social and Economic Mobility in the Indonesia-Timor Leste Border Area ( Case Study in Motaain Region Belu Regency ). *Jurnal Legal Brief*, 14(2), 195–204.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35335/legal.v14i2.1279>
- Okimura, I., Reid, M., Kawano, M., & Matsuo, Y. (2022). On the Impact of Data Augmentation on Downstream Performance in *Natural Language Processing. Insights 2022-3rd Workshop on Insights from Negative Results in NLP, Proceedings of the Workshop*, 26(Proceedings of the Third Workshop on Insights from Negative Results in NLP), 88–93.  
<https://doi.org/10.18653/v1/2022.insights-1.12>
- Pamungkas, C. (2016). PERBATASAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL: Studi Perbatasan RI-Timor Leste. *Jurnal Ledalero*, 15(1), 150.  
<https://doi.org/10.31385/jl.v15i1.34.150-175>
- PLBN. (2025). *Data Pelintas Batas Indonesia dan Timor Leste*.  
<https://tasbara.bnpp.go.id/profil?name=PLBN> Motaain
- Ratnadhita, C., Puryanti, L., Husain, S. B., Budaya, F. I., Airlangga, U., Ratnadhita, C., & Airlangga, U. (2025). Dinamika Permasalahan Masyarakat Perbatasan Indonesia – Timor Leste : Menyikapi Lintas Batas Negara Dynamics of the Problems of the Indonesian-Timor Leste Border Community : Addressing Cross-Border Relations. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Khatulistiwa*, X(1), 16–28.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipsk.v10i1.5268>
- Remigius, S. (2018). Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste Remigius Seran. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(Hubungan Internasional), 12–26.

- Runggandini, C. W. M. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DARAT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE DI WILAYAH ENCLAVEOEUCUSSI. *Journal of Indonesian Adat Law (Jial)*, Volume 2 N, 68–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.46816/jial.v2i1.26>
- Seran, R. (2019). Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(2), 170. <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i2.9226>
- Sudika Mangku, D. G. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan – Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.17977/um019v5i2p252-260>
- Suwartiningsih, S., Purnomo, D., & Lahade, J. R. (2020). The role of social capital on international *trade* transactions at wini market, in realizing social harmonization of Indonesia-timor leste *border* community. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(52), 1829–1836. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.209>
- Yerianto, Y. S. (2015). Penyelesaian Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dalam Konteks Tata Ruang. *Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Airlangga. Founder Rumah Baca Potensial Kabupaten Kupang*, 5(1), 12. [https://repository.unair.ac.id/70886/3/JURNAL\\_TP.02 18 Sab s.pdf](https://repository.unair.ac.id/70886/3/JURNAL_TP.02%2018%20Sab%20s.pdf)
- Yohanes, Arman. Junaldo, Klau. Kaldianus, U. (2024). PENYELESAIAN KONFLIK PERBATASAN INDONESIA-TIMORLESTE DALAM KONTEKSPOLITIK TATA RUANG. *Journal of Law Nation*, 3(4), 887–898. <https://doi.org/https://doi.org/10.53555/jrtdd.v6i1.3142>

# KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA DIGITAL: TRANSFORMASI, TANTANGAN, DAN PELUANG

---

**Medan Yonathan Mael\***

Revolusi digital telah mengubah secara fundamental hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi, berbelanja, belajar, hingga bekerja. Dunia pemerintahan dan kebijakan publik pun tidak luput dari gelombang transformasi ini. Era digital bukan hanya sekadar memindahkan proses analog ke dalam bentuk digital, tetapi ia menciptakan paradigma baru dalam cara pemerintah beroperasi, melayani warga, dan membuat keputusan. Kemunculan teknologi seperti internet, *big data*, dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) membuka peluang yang belum pernah terbayangkan sebelumnya untuk menciptakan kebijakan yang lebih cerdas, efisien, dan partisipatif.

Di balik semua janji dan optimisme tersebut, era digital juga membawa serangkaian tantangan dan dilema baru yang kompleks. Isu-isu krusial seperti privasi data, keamanan siber, bias algoritma, dan kesenjangan digital (*digital divide*) menjadi agenda kebijakan yang mendesak untuk ditangani. Pemerintah di seluruh dunia kini berlomba untuk beradaptasi, mencoba memanfaatkan potensi teknologi sambil memitigasi risikonya. Kegagalan dalam menavigasi era ini tidak hanya akan membuat sebuah negara tertinggal, tetapi juga dapat menciptakan bentuk bentuk baru dari ketidakadilan dan kontrol sosial.

Penelitian ini akan memulai pembahasannya dengan konsep *E-Government*, yakni melihat bagaimana pemerintah menggunakan teknologi untuk mereformasi layanan publik dan birokrasi internalnya. Selanjutnya akan dibahas dunia *big data* dan analitik, untuk melihat bagaimana data yang melimpah dapat diolah menjadi wawasan berharga untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan. Penelitian ini juga akan membahas potensi transformatif, sekaligus risiko, dari penerapan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan publik. Perjalanan gagasan yang tidak berhenti pada aspek teknokratis akan dilanjutkan dengan mengeksplorasi sisi demokrasi dari era digital, yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan melalui *platform e-participation* dan *crowdsourcing*. Refleksi kritis mengenai tantangan utama yang harus dihadapi, terutama

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelle, C., & Weiland, S. (2012). Policy assessment: The state of the art. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 30(1), 25–35.  
<https://doi.org/10.1080/14615517.2012.663268>
- Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, S., Achadi, E. L.,... & Shankar, A. H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: Concept, progress, and challenges. *The Lancet*, 393(10166), 75–102. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31647-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7)
- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aven, T. (2016). Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation. *European Journal of Operational Research*, 253(1), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.12.023>
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (6th ed.). CQ Press.
- Bason, C. (2018). *Leading public sector innovation: Co-creating for a better society* (2nd ed.). Policy Press.
- Basri, M. C. (2021). The Indonesian economy in the time of COVID-19: A tale of two crises. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 265–289. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2000255>
- Baumgartner, F. R., Jones, B. D., & Leech, B. L. (2018). *Lobbying and policy change: Who wins, who loses, and why*. University of Chicago Press.
- Beetham, D. (2013). *The legitimation of power* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Bennet, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768.  
<https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>
- Berry, J. M., & Wilcox, C. (2018). *Interest groups and lobbying: Pursuing political interests in America*. Westview Press.

- Birkland, T. A. (2020). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making* (5th ed.). Routledge.
- BNPB. (2022). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2044*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Bobrow, D. B., & Dryzek, J. S. (2020). *Policy analysis by design* (2nd ed.). Routledge.
- Boslaugh, S. (2020). *Secondary data sources for public health: A practical guide*. Cambridge University Press.
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2003). Evaluating the quality of public governance: Tensions in a 'four-quadrant' model. *International Review of Administrative Sciences*, 69(3), 315-327.
- Brabham, D. C. (2013). *Crowdsourcing*. MIT Press.
- Briceno, B. (2021). Monitoring and evaluation: A practitioner's guide. In *The Practice of International Development* (pp. 37-56). Routledge.
- Broughel, J., & Hahn, R. W. (2021). The consequences of regulatory accumulation and a path forward. *Journal of Benefit-Cost Analysis*, 12(2), 241-262. <https://doi.org/10.1017/bca.2020.31>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Cairney, P. (2019). *Understanding public policy: Theories and issues* (2nd ed.). Red Globe Press.
- Cairney, P., & Oliver, K. (2017). Evidence-based policymaking is not like evidence-based medicine, so how far should you go to bridge the divide between evidence and policy?. *Health Research Policy and Systems*, 15(1), 1-11. <https://doi.org/10.1186/s12961-017-0192-x>
- Cartwright, N., & Hardie, J. (2012). *Evidence-based policy: A practical guide to doing it better*. Oxford University Press.
- Crawford, K. (2021). *The atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence*. Yale University Press.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Sage publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Engin, Z., & van Dijk, J. (2020). The digital transformation of government: A new agenda for public administration research. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101529.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., & Zyglidopoulos, S. (2018). *Stakeholder theory: The state of the art*. Cambridge University Press.

- Fung, A. (2015). Putting the public back into *governance*: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513-522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Geddes, B., Wright, J., & Frantz, E. (2018). *How dictatorships work: Power, personalization, and collapse*. Cambridge University Press.
- Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. (2016). *Impact evaluation in practice* (2nd ed.). World Bank Publications.
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to save a constitutional democracy*. University of Chicago Press.
- Greene, J. C. (2007). *Mixed methods in social inquiry*. John Wiley & Sons.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Harper, S. (2017). *Ageing societies: Myths, challenges and opportunities*. Routledge.
- Head, B. W. (2017). *Wicked problems in public policy*. Palgrave Macmillan.
- Hermanto, B., & Suryanto, S. (2017). The challenges of civil servant competency in Indonesia. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 24(2), 105-111.
- Hodge, G. A., & Greve, C. (2017). On public-private partnership performance: A contemporary review. *Public Works Management & Policy*, 22(1), 55-78. <https://doi.org/10.1177/1087724X16657830>
- Iyengar, S., & Westwood, S. J. (2015). Fear and loathing across party lines: The emotional underpinnings of political polarization. *American Journal of Political Science*, 59(3), 690-707. <https://doi.org/10.1111/ajps.12152>
- Jacobs, M., & Mazzucato, M. (Eds.). (2016). *Rethinking capitalism: Economics and policy for sustainable and inclusive growth*. John Wiley & Sons.
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. *Information Systems Management*, 29(4), 258-268. <https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740>
- Katz, R. S., & Mair, P. (2018). *Democracy and the cartelization of political parties*. Oxford University Press.
- KemenPAN-RB. (2020). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*.
- Kenney, M., & Zysman, J. (2016). The rise of the *platform* economy. *Issues in Science and Technology*, 32(3), 61-69.

- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Pearson.
- Kitchin, R. (2014). *The data revolution: Big data, open data, data infrastructures & their consequences*. Sage.
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2021). *Public policy: Politics, analysis, and alternatives* (7th ed.). CQ Press.
- Levin, H. M., McEwan, P. J., & Belfield, C. (2017). *Cost-effectiveness analysis: Methods and applications* (2nd ed.). Sage publications.
- Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2013). *Memperbaiki Kualitas Demokrasi di Indonesia: Sebuah Kerangka untuk Aksi*. Freedom Institute.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th Anniversary ed.). Russell Sage Foundation.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Maryudi, A., Nawir, A. A., Siscawati, M., & Sofiyuddin, M. (2021). Whither social forestry in Indonesia? *Forest and Society*, 5(2), 263-276. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.11584>
- Mason, L. (2018). *Uncivil agreement: How politics became our identity*. University of Chicago Press.
- McCombs, M. (2018). *Setting the agenda: The mass media and public opinion* (2nd ed.). Polity Press.
- Meijer, A. J. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. *Public Administration Review*, 73(3), 429-439.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from a systematic review. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101351. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Mietzner, M. (2020). *Reinventing Asian populism: Jokowi's democratic-technocratic and illiberal-populist styles*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Mintrom, M. (2019). So you want to be a policy entrepreneur?. *Policy Design and Practice*, 2(4), 307-323. <https://doi.org/10.1080/25741292.2019.1673327>
- Mishan, E. J., & Quah, E. (2020). *Cost-benefit analysis* (6th ed.). Routledge.
- Morra Imas, L. G., & Rist, R. C. (2009). *The road to results: Designing and conducting effective development evaluations*. World Bank Publications.
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2015). *Public participation for 21st century democracy*. John Wiley & Sons.
- Nakaya, A. (2018). Overcoming the curriculum reform dilemma: an analysis of the "2013 curriculum" reform in Indonesia. *E-Journal of Comparative and International Education*, 7(1).

- OECD-DAC. (2019). *Better criteria for better evaluation: Revised evaluation criteria definitions and principles for use*. OECD/DAC Network on Development Evaluation.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. Crown.
- Ostrom, E. (2015). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Panopoulou, E., Tambouris, E., & Tarabanis, K. (2014). A framework for evaluating e-participation platforms. *Information & Management*, 51(3), 372-386.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Sage publications.
- Peters, B. G. (2018). *The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration* (7th ed.). Routledge.
- Piketty, T. (2020). *Capital and ideology*. Harvard University Press.
- Prasojo, E. (2018). Challenges of civil service reform in a decentralized Indonesia. In *Public Sector Reform in ASEAN Member Countries and Korea* (pp. 55-80). Korean Institute of Public Administration.
- Pratama, A. R. (2020). The effectiveness of the national public service complaint management system (SP4N-LAPOR!) in Indonesia. *Policy & Governance Review*, 4(3), 186-203.  
<https://doi.org/10.30589/pgr.v4i3.189>
- Purba, H. S. (2021). The role of waste banks in managing municipal solid waste in Indonesia. *Journal of Environmental Management*, 297, 113298.
- Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., Ilham, Q. P., Pacheco, P., Nurfatriani, F., & Suhendang, E. (2021). Reconciling oil palm economic development and environmental conservation in Indonesia: A value chain approach. *Forest Policy and Economics*, 123, 102375.
- Ravallion, M. (2016). *The economics of poverty: History, measurement, and policy*. Oxford University Press.
- Resosudarmo, B. P., Alisjahbana, A. S., & Nurkholis, N. (2020). The economy-wide impact of reducing energy subsidies in Indonesia. *Energy Policy*, 137, 111103.  
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111103>
- Rich, A. (2004). *Think tanks, public policy, and the politics of expertise*. Cambridge University Press.

- Rogge, K. S., & Reichardt, K. (2016). Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis. *Research Policy*, 45(8), 1620-1635.  
<https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004>
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed.). Sage publications.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Schlozman, K. L., Verba, S., & Brady, H. E. (2012). *The unheavenly chorus: Unequal political voice and the broken promise of American democracy*. Princeton University Press.
- Schradie, J. (2018). The digital production gap: The digital divide and Web 2.0 collide. *Poetics*, 68, 50-64.
- Schwab, K. (2022). *The Great Narrative*. Forum Publishing.
- Schwindt-Bayer, L. A., & Tavits, M. (2016). *Clarity of responsibility, platform distinctiveness, and democratic accountability*. Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E. (2017). *Globalization and its discontents revisited: Anti-globalization in the era of Trump*. WW Norton & Company.
- Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Torring, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2019). Transforming the public sector into an arena for co-creation: A literature review and a new research agenda. *Public Management Review*, 21(5), 629-648.
- Tucker, J. A., Guess, A., Barberá, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S.,... & Nyhan, B. (2018). Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature. *Hewlett Foundation*.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.
- UN PRI. (2021). *The Inevitable Policy Response: 2021 Policy Forecasts*. Principles for Responsible Investment.
- UNEP. (2011). *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*. United Nations Environment Programme.

- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN Publishing.
- United Nations. (2022). *E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. UN Publishing.
- van Dijk, J. A. (2020). *The digital divide*. Polity Press.
- Vatn, A. (2020). *Environmental governance: Institutions, policies and actions*. Edward Elgar Publishing.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151.  
<https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy analysis: Concepts and practice* (6th ed.). Routledge.
- Weiss, C. H. (1999). The interface between evaluation and public policy. *Evaluation*, 5(4), 468-486.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. World Bank.
- World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospects, June 2021: The Green Road to Recovery*. World Bank.
- World Health Organization. (2021). *Building health systems resilience for universal health coverage and health security during the COVID-19 pandemic and beyond*. WHO.
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2018). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, 37(2), 165-171.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage publications.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

# MERETAS SEKAT BIROKRASI MELALUI KERJA SAMA ANTAR DAERAH DI PERBATASAN INDONESIA–TIMOR LESTE

---

Egidius Fkun\*

Wilayah perbatasan sering kali dipandang sebagai daerah pinggiran yang tertinggal dalam pembangunan. Di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste, kondisi ini tercermin dari lemahnya praktik kerja sama antar daerah, meskipun potensi sosial, ekonomi, dan budaya sangat besar. Tulisan ini berupaya mengeksplorasi urgensi kerja sama antar pemerintah daerah di perbatasan, mengidentifikasi hambatan utama yang membentuk sekat kelembagaan dan sosial, serta menelaah peluang strategis yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas daerah. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder dan temuan lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerja sama antar daerah di wilayah perbatasan hingga kini belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor keterbatasan kapasitas, ego sektoral, minimnya regulasi, dan lemahnya komitmen politik. Padahal, peluang kerja sama terbuka luas pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian-peternakan, serta pemasaran produk unggulan daerah. Oleh karena itu, strategi “meretas sekat” ditawarkan sebagai pendekatan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, memperkuat kelembagaan, menyusun *baseline* data, serta membangun forum kerja sama lintas kabupaten. Dengan dukungan regulasi dan kebijakan nasional, kerja sama antar daerah di perbatasan dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, sinergis, dan berkelanjutan.

## Pendahuluan

Wilayah perbatasan kerap dipersepsikan sebagai “halaman belakang” negara tempat di mana kebijakan pembangunan sering tertinggal, konektivitas terbatas, dan kerja sama lintas daerah belum optimal. Di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste, kondisi ini terlihat pada minimnya kerja sama antar daerah di sisi Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Padahal, wilayah perbatasan memiliki

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, B. (2005). *Pemahaman Dasar Regional Management Dan Regional Marketing: Instrumen Strategis Pembangunan Wilayah Dan Kota Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Dan Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Semarang: IAP Jateng.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2023). *PLBN Wini dorong partisipasi BPD percepat pembangunan perbatasan RI-Timor Leste*.  
<https://bnpp.go.id/berita/plbn-wini-dorong-partisipasi-bpd-percepat-pembangunan-perbatasan-ri-timor-leste>
- Bovaird, T., & Löffler, E. (Eds.). (2009). *Public management and governance* (2nd ed.). London: Routledge.
- Fkun, E. (2023). *Menggagas model kerja sama antar daerah di wilayah perbatasan dalam bidang pertanian: Studi di Kabupaten TTU, Belu, dan Malaka* (Disertasi). FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Fkun, E., Nurasa, H., Redjo, S. I., & Mulyawan, R. (2023). Initiating Intergovernmental Networks in Border Areas from a Sound Governance Perspective. *Journal of Namibian Studies: History, Politics, Culture*, 33(June), 1–20.  
<https://doi.org/10.59670/jns.v33i.823>
- Huxham, C., & Vangen, S. (2005). *Managing to collaborate: The theory and practice of collaborative advantage*. London: Routledge.
- Jimea, M. (2022). Pembangunan Wilayah Perbatasan dan tantangan pembangunan manusia di perbatasan Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 10(2), 45–59.  
<https://jurnalistiqomah.org/index.php/jimea/article/view/1320/1118>
- Muluk, K., & M.R. (2012). *Kompleksitas Kerja Sama Antar Daerah*. Malang: UB Press.
- Pratikno (Ed.). (2007). *Mengelola Dinamika Politik Dan Jejaring Pemerintahan*. Yogyakarta: Jogja Global Media.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Suryohadiprojo, S. (2016). *Budaya Gotong royong dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Tarigan, A. (2009). *Kerja sama antar daerah (kad) untuk peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dan daya saing*. Jakarta: Bappenas.

# GENDER DAN PERBATASAN

---

M. Angela Merici Siba\*

## Pendahuluan

Isu gender bukan merupakan isu yang baru dibicarakan. Gender bukan dipahami sebagai jenis kelamin biologis tetapi maknanya lebih kepada peran yang terbentuk secara sosial. Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam Masyarakat (Mazaya, 2014). Laki-laki dan Perempuan sering dibedakan dalam hal jenis kelamin dan perannya dalam lingkungan sosial. Perbedaan tersebut mengakar dan terus terkonstruksi. Meskipun banyak perjuangan yang dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat tentang peran perempuan dan laki-laki, tetapi masih terdapat ketimpangan yang terus membedakan perempuan dan laki-laki. Perbedaan tersebut seperti pola kerja, keterlibatan di lingkungan sosial termasuk dalam politik, akses perempuan terhadap Pendidikan, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan.

Gender merupakan sebuah konsep yang merujuk pada peran, perilaku, dan atribut yang dianggap sebagai karakteristik khas laki-laki dan Perempuan dalam suatu Masyarakat (Tanjung, Ishomuddin, Wahyudi, & Saleh, 2024). Perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang sering dibedakan berdasarkan faktor sosial, budaya dan lingkungan. Hal ini yang mengakibatkan Perempuan sering terpinggirkan, mengalami diskriminasi, bahkan tindakan kekerasan. Laki-laki dianggap bertanggung jawab dalam mencari nafkah, sehingga perannya dianggap lebih penting dan keterlibatannya dalam lingkup sosial, politik dan budaya lebih diutamakan. Berbeda dengan perempuan yang dianggap lemah dan hanya mampu bekerja dalam lingkup rumahan, sehingga perannya cenderung dibatasi. Ketimpangan ini pun menjadikan laki-laki lebih diutamakan dalam hal Pendidikan. Laki-laki diberikan pendidikan yang mengarahkan mereka untuk terjun aktif dalam kegiatan publik. Perempuan pun diberi kesempatan yang sama, namun karena terbentur dengan adat dan tradisi, hanya sedikit saja perempuan yang terus bersekolah hingga tingkatan yang tinggi (Ningrum, 2018). Perempuan lebih banyak tidak mengenyam

## DAFTAR PUSTAKA

- Araujo, E. (2025, Mei 6). *Pasar Perbatasan Menjadi Pusat Perdagangan-Devisa Bagi Indonesia*. (F. Lede, Editor) Retrieved Juli 1, 2025, from <https://rri.co.id/>: <https://rri.co.id/atambua/daerah/1500265/pasar-perbatasan-menjadi-pusat-perdagangan-devisa-bagi-indonesia>
- Arliman, L. (2016, Oktober). Penguatan Perlindungan anak dari Tindakan Humman Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(1), 15-32.
- Astuti, T. (2018, Juni). Trafficking di Pos Lintas Batas Entikong-Tebedu: Kasus di Perbatasan Indonesia dengan Malaysia. *Forum Ilmu Sosial*, 45(1), 34-50.
- Dhae, A. (2023, Juni 29). *Polres Belu Tangkap 4 Pelaku TPPO Antarnegara*. Retrieved Juni 1, 2025, from [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/): <https://mediaindonesia.com/nusantara/592989/polres-belu-tangkap-4-pelaku-tpo-antarnegara>
- Halizah, L., & Faralita, E. (2023, Februari). Budaya Patriarki dan Kesenjangan Gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19-32.
- Hamidin. (2025, Maret 15). *Memaknai Hubungan Bilateral Timor Leste dan Indonesia*. Retrieved Juni 02, 2025, from Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI): <https://bnpp.go.id/berita/memaknai-hubungan-bilateral-timor-leste-dan-indonesia>
- Herlan, & Sikwan, A. (2018, Desember). Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Perdagangan Wanita (Trafficking) Di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat. *Ilmu Sosial dan Humaniora*, 23(2), 103-117.
- Kartini, I. (2024). Perbedaan Visi Geopolitik Perbatasan Darat Indonesia dan Timor Leste di Segmen Naktuka (Noel Besi-Citrana) (2019-2022). *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 50(2), 317-328.
- Mazaya, V. (2014, April). Kesenjangan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam. *SAWWA*, 9(2), 323-344.
- Nahak, W., Widhiyoga, G., & Dipokusumo. (2021). Upaya Kerjasama Keamanan Indonesia-Timor Leste Studi Kasus Penyelundupan Bahan Bakar Minyak di wilayah Perbatasan Motaain Tahun 2017-2018. *Review of International Relations*, 1(3), 38-64.
- Ndun, N., Laibois, R., Radho, A., & Arman, Y. (2024, Juli). Dampak Perdagangan Lintas-Batas terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7), 1-8.

- Ningrum, S. U. (2018, Oktober). Perempuan Bicara dalam Majalah Dunia Wanita: Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga di Indonesia, 1950-an. *Lembaran Sejarah*, 14(2), 194-215.
- Oki, K. (2021). *Perdagangan Lintas Batas Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi-Timor Leste*. Pasuruan, Jawa Timur: Qiara Media.
- Putri, L., & Tanebet, M. (2023, Desember). Strategi Pemerintah Republik Indonesia Guna Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Berdasarkan Perspektif Sosial Pembangunan: Studi Kasus Kawasan perbatasan Republik Indonesia (RI)-RDTL di Atambua Kabupaten Belu NTT. *Jurnal Konstituen*, 5(2), 145-165.  
doi:<https://doi.org/10.33701/jk.v5i2>.
- Rinaldy, E., Ikhlas, D., & Utama, A. (2018). *Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santo. (2024, Februari 1). *Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Retrieved Juli 1, 2025, from [Pemerintahan.uma.ac.id: https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/02/peran-perempuan-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia/](https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/02/peran-perempuan-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia/)
- Tanjung, Y., Ishomuddin, Wahyudi, & Saleh, A. (2024). *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*. Medan: Umsu Press.
- Tawa, K., Neves, R., Meta, Y., Djoka, N., & Arman, Y. (2024, Juli). Peran Bea Cukai dalam Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan BBM ke Timor Leste di Perbatasan TTU. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7), 668-677.

# **UNVISIBLE BORDER: KETAHANAN NASIONAL DAN PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENJAGA KEDAULATAN DI PERBATASAN NKRI-RDTL**

---

**Mariano Sengkoen\***

Penelitian ini menganalisis ketahanan nasional di wilayah perbatasan NKRI-RDTL dengan menyoroti peran sentral pemerintahan daerah dalam menjaga stabilitas negara. Perbatasan, meskipun seringkali terabaikan dalam diskursus ketahanan nasional, merupakan area yang penuh dengan tantangan tersembunyi yang membutuhkan perhatian serius. Ketahanan nasional di perbatasan tidak hanya bergantung pada dimensi militer, tetapi juga pada kearifan lokal, diplomasi lintas batas, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Melalui integrasi teori kontrak sosial, *governmentality*, dan neoliberalisme, penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai mediator antara kebijakan pusat dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, teori kontrak sosial dari Hobbes, Locke, dan Rousseau diterjemahkan menjadi kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap kearifan lokal. Sementara itu, prinsip *governmentality* Foucault diterapkan dalam pengaturan lokal yang produktif, di mana pemerintah daerah mengatur kehidupan masyarakat untuk menjaga ketahanan. Penelitian ini juga menyoroti diplomasi berbasis masyarakat di wilayah perbatasan sebagai salah satu contoh nyata bagaimana ketahanan nasional bisa diperkuat dengan pendekatan *non-tradisional*. Pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi di perbatasan. Dengan demikian, ketahanan nasional di perbatasan memerlukan pendekatan multidimensi yang didukung dengan desain kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

## **Pengantar**

Ketahanan nasional, sebagai konstruk multidimensional yang menautkan dimensi politik, keamanan, sosial, dan ekonomi, menjadi kerangka epistemik fundamental dalam menghadapi tantangan perbatasan NKRI-RDTL yang sarat kompleksitas. Dalam era globalisasi sekaligus

## DAFTAR PUSTAKA

- Atikawati, Dini., Harahab, Nuddin., Caesar, Nico Rahman., Puspitawati, Dhiana., Muflihulafi, Dimas Andika., Supriyadi., Wardana, Novar Kurnia., Hakim, Andy Ilman., Fathah, Aulia Lanudia., Putri, Berlania Mahardika., Isdianto, Andik., Maskan, Mohammad., Utaminingsih, Alifiulahtin. (2024). Political and Ideological Vulnerabilities in Indonesia's *Border* with Timor-Leste to Support State Resilience and Security: A Study on Belu and Malaka Regencies. *International Journal of Sustainable Development and Planning* 19[6], 2319-2331. DOI: <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190630>
- Binsasi, Heribertus., Seran, Remigius., Nino, Handrianus. (2024). Harmonization of *Border* Communities between Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste. *Journal of Law Science* 7[1], 80-89. DOI: <http://dx.doi.org/10.35335/jls.v7i1.5969>
- Dugis, Vinsensio. (2016). *Teori Hubungan Internasional: Perspektif Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Foucault, Michel. 1991. *Governmentality*. Dalam *The Foucault Effect: Studies In Governmentality: With Two Lectures By And An Interview With Michel Foucault*, Oleh Graham Burchell, Colin Gordon Dan Peter Miller, 87-104. Chicago: The University Of Chicago Press.
- Hobbes, Thomas. (1651) *De Cive*. John Roland (ed). London: R. Royston.
- Locke, John. (1690). *Two Treatises of Government*. Disunting oleh P. Laslett (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Madu, Ludiro., Nugraha, Aryanta., Kusumo, Yudhy Widya. (2025). Increasing Indonesia-Timor Leste *Borders* Diplomacy through Community-Based Health Security. *Global Strategies* 19[1], 67-90. DOI: <https://doi.org/10.20473/jgs.19.1.2025.67-90>
- Majid, Qayla Latifah Hariady. (2025). Pemetaan Risiko Keamanan Nasional: Kajian Strategis Terhadap Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Nasional dalam Menangani Konflik Sosial di Wilayah Perbatasan. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 9[4]. DOI: <https://doi.org/10.9963/q1xdx483>
- Mudhoffir, Abdil Mughis. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi* 18[1], 75-100. DOI: <https://doi.org/10.7454/MJS.v18i1.1253>

- Rachman, Zaky Umar., dan Rofii, Muhammad Syaroni. (2025). Enhancing Immigration Functions at the Motaain *Cross-Border* Post and Its Relation to National Resilience. *Asian Journal of Engineering, Social and Health (AJESH)* 4[6]. DOI: <https://doi.org/10.46799/ajesh.v4i6.569>
- Ronaldi, T. (2025). *Strengthening National Resilience Through Integration of Public Policies and National Defense Strategies in Managing Indonesia's Border Areas*. *NAPBRES Journal* 1[1],1–19. <https://journal-iasssf.com/index.php/NAPBRES/article/view/2138>
- Rousseau, Jean Jacquess. (1762). *The Social Contract*. C. Betts, (ed.). Oxford: Oxford University Press. 1999.
- Sugiarti, Eni., Tsuchiya, Kisho., Romadhona, Mochamad Kevin., Puryanti, Lina. (2024). Contesting Sovereignty: The State-Indigenous Relations at the Indonesia-Timor-Leste *Borderlands*. *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 12[2], 439-460. DOI: <http://dx.doi.org/10.21512/jas.v12i2.11467>
- Susilo, H., Rijanta, R., & Zubaidi, Ahmad. (2024). Implications of the Unresolved Segment in Noel Besi-Citrana, Land *Borders* of Indonesia-Timor Leste, for Territorial Resilience. *Multidisciplinary Science Journal* 6[10], 202-222. DOI: <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024222>
- Yahya, Yudhi., Widjayanto, Joni., Hendra, Afrizal. (2024). National Security Threats in the Indonesian *Border* Areas with Timor Leste. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)* 3[2], 209-218. DOI: <http://dx.doi.org/10.55927/esa.v3i2.8494>

# **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK BATAS NEGARA**

**(Studi Kasus pada Segmen Noelbesi-Citrana antara Negara  
Republik Demokratik Timor Leste dan Negara Republik Indonesia)**

---

**Yakobus Kolne\***

Dalam konteks kontemporer, seiring dengan intensitas dan luasnya masyarakat transnasional (*transnational communities*) dan nasionalisme berkaitan erat dengan masalah kedaulatan. Isu perbatasan merupakan masalah keamanan tradisional, sesungguhnya menjadi semakin kompleks dengan munculnya isu-isu baru seperti konflik etno-religius, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, perdagangan narkoba, pencucian uang, terorisme, dan lain-lain. Permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dibagi ke dalam dua kategori sengketa perbatasan, yaitu *unresolved segment* dan *unsurveyed segment*. Pada kasus Noelbesi-Citrana adanya dua kategori dimana Indonesia menghendaki garis batas negara berada pada posisi sebelah barat sungai kecil. Namun, Timor Leste memiliki pandangan berbeda. Oleh karena itu melalui keterbatasan pemerintah sebagai pelayan publik untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang baik perlu melibatkan pihak lain agar dapat mencapai hasil tersebut secara maksimal. Di sadari bahwa kolaborasi itu ada karena adanya sifat saling membutuhkan antar organisasi dalam mengurus suatu permasalahan atau kegiatan.

## **Pendahuluan**

Isu perbatasan yang masuk dalam kualifikasi masalah keamanan tradisional, sesungguhnya menjadi semakin kompleks dengan munculnya isu-isu baru seperti konflik etno-religius, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, perdagangan narkoba, pencucian uang, terorisme, dan lain-lain. Hal ini merupakan sebuah tantangan negara yang harus dicegah dan bahkan diatasi secara baik dan fokus sehingga tidak berdampak pada stabilitas negara. Salah satu faktor penyebab adalah lemahnya kebijakan perbatasan dan pengawasannya yang merupakan undangan tidak langsung terhadap munculnya berbagai aktor internasional dengan berbagai agenda jahatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 2011, Desain Besar (*Grand Design*) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, BNPP Pusat, Jakarta.
- Dokumen Oil Poli, 9 Februari 1915 tentang Mendeskripsikan Batas antara Pemerintah Koloni Belanda dan Portugis di Daerah Noel Besi.
- Harmen Batubara, (2015). Penetapan dan Penegasan Batas Negara: Masalah Noel Besi-Citrana, Timor Leste Mancaplok Tanah di Lahan Sengketa Perbatasan. Penerbit Wilayah Perbatasan, Bandung.
- Madu Ludiri, dkk. (2010). Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pemilihan Kebijakan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mangku, D. B. (2019). Penyelesaian Sengketa di Segmen Noelbesi-Citrana antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Cakrawala Hukum Universitas Wijaya Kusuma*, 1-19.
- Mendonca, R. D. (2013). *Kebijakan Pemerintah Republic Democratica De Timor-Leste dan Republik Indonesia dalam Penyelesaian Batas Wilayah Darat*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Atmajaya.
- Noor, F. (2013). Negara dan kedaulatan politik. Dalam M. Noveria (ed.), *Kedaulatan negara di wilayah perbatasan: Tinjauan multidimensi* (pp. 97–138). Jakarta: PPK-LIPI.
- Nurdjaman, P. 2002: Optimalisasi Peran dan Fungsi Survei Pemetaan dalam Pengelolaan Batas Wilayah. Prosiding Forum Komunikasi Teknis Batas Wilayah, pp. 29-50 Bogor, Indonesia.
- Raharjo, S. N. (2014). Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara-Indonesia dengan Warga Distrik Oecusse-Timor Leste Pada 2012-2013. *Jurnal Pertahanan*, 4.1, 157-165.
- Wuryandari Ganewati, dkk. (2009). Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: sumber ancaman dan kebijakan pengelolaannya. Pustaka Pelajar. Jakarta

# **CROSS BORDER TRADE DAN FENOMENA PASAR ILEGAL DI PERBATASAN INDONESIA DAN TIMOR LESTE**

---

**Ronaldus Nurak  
Remigius Seran\***

Perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste memiliki dinamika yang unik karena dipengaruhi oleh faktor sejarah, geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat perbatasan. Di tengah upaya formal pemerintah kedua negara untuk mengatur arus barang melalui pos lintas batas resmi, praktik pasar ilegal tetap tumbuh subur sebagai bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat. Pasar ilegal ini muncul akibat keterbatasan akses distribusi, tingginya kebutuhan barang konsumsi harian, disparitas harga antara kedua negara, serta lemahnya pengawasan di jalur-jalur *non-resmi*. Keberadaan pasar ilegal memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat perbatasan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dan peluang mata pencaharian, namun di sisi lain menimbulkan tantangan serius terkait pengendalian keamanan, potensi kerugian negara dari sektor pajak dan bea cukai, serta risiko kriminalitas. Fenomena pasar ilegal di perbatasan Indonesia dan Timor Leste menuntut adanya langkah strategis dari pemerintah untuk menanganinya secara komprehensif. Selama ini, pasar ilegal tidak hanya dipicu oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga oleh kebutuhan nyata masyarakat perbatasan yang bergantung pada akses cepat dan murah terhadap barang konsumsi.

## **Pendahuluan**

Perdagangan lintas batas telah ada sejak zaman kuno, namun perkembangan teknologi dan globalisasi telah mendorongnya menjadi lebih dinamis dan kompleks. Jalur perdagangan kuno seperti Jalur Sutra menghubungkan Asia dengan Eropa, memungkinkan pertukaran barang seperti rempah-rempah, sutra, dan barang berharga lainnya. Pada masa itu, perdagangan lintas batas tidak hanya melibatkan transaksi ekonomi, tetapi juga pertukaran budaya dan teknologi antara berbagai peradaban. Pada abad ke-20, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi, seperti kapal laut, kereta api, dan pesawat terbang, semakin mempercepat laju

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Lughod, J. (1989). *Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350*. Oxford University Press.
- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). *Penguatan Pengawasan Perdagangan Lintas Batas di Wilayah Perbatasan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. (2019). *Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Ernawati, L., & Berek, S. (2021). *Dinamika perdagangan lintas batas masyarakat di perbatasan Indonesia–Timor Leste*. Jurnal Sosiohumaniora, 23(2), 155–170.  
<https://doi.org/10.xxxx/sosiohumaniora.232155>
- Fanggidae, V. (2018). *Perdagangan lintas batas ilegal dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Penelitian Politik, 15(1), 45–60.
- Frankopan, P. (2015). *The Silk Roads: A New History of the World*. Bloomsbury Publishing.
- Hasyim, M. (2020). *Cross-border trade and security challenges in Indonesia–Timor Leste boundary*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 10(2), 201–220.
- International Organization for Migration (IOM). (2019). *Border Management and Cross-Border Trade in Timor-Leste*. IOM Publications.
- Martínez, O. J. (1994). *Border People: Life and Society in the U.S.–Mexico Borderlands*. University of Arizona Press.
- Nugroho, H., & Liliweri, A. (2019). *Pola interaksi masyarakat di perbatasan Indonesia–Timor Leste dalam perspektif sosial-budaya*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 21(3), 345–362.
- Pemerintah Republik Indonesia & Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste. (2015). *Joint Border Committee Meeting Report*. Dili–Jakarta.
- Setiawan, A. (2020). *Kebijakan pengelolaan perdagangan lintas batas Indonesia–Timor Leste: Antara legalitas dan praktik ilegal*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(3), 201–219.

Sukmana, O. (2022). *Pemberdayaan masyarakat perbatasan dalam mengatasi ketergantungan terhadap pasar ilegal*. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 8(2), 233–248.

Tim Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). (2021). *Laporan Tahunan Pengelolaan Perbatasan Negara*. Jakarta: BNPP.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

# **SENI MENYARING PEMIMPIN: EKSPLORASI STRATEGI REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH OLEH DPC PDIP KABUPATEN MALAKA**

---

**Fridus Bria  
Adeodata Laniria Charla Barros Mbiri\***

Dalam lanskap politik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sistem multipartai hadir sebagai pilar utama dalam mekanisme pemilihan umum yang inklusif. Sistem ini memungkinkan keterlibatan banyak partai politik dalam kontestasi kekuasaan, baik secara mandiri maupun melalui aliansi strategis, guna merebut legitimasi pemerintahan dalam berbagai tingkatan, mulai dari kepemimpinan nasional hingga pemerintahan lokal seperti pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten. Dinamika ini menempatkan partai politik bukan sekadar sebagai entitas kompetitif, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam proses kaderisasi dan seleksi kepemimpinan daerah. Penelitian ini mengangkat studi kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Malaka sebagai fokus kajian, dengan tujuan mendalami strategi politik yang diterapkan dalam proses rekrutmen calon kepala daerah, khususnya dalam rangka menghadapi kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2019. Pendekatan metodologis yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan landasan studi kasus sebagai teknik eksplorasi terhadap fenomena politik lokal yang kompleks. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa DPC PDIP Kabupaten Malaka mengimplementasikan model rekrutmen politik yang bersifat terbuka, memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat, baik sebagai calon anggota maupun simpatisan partai. Namun demikian, dalam proses seleksi calon kepala daerah, partai menerapkan sistem penyaringan bertahap berbentuk piramida, di mana setiap kader internal diseleksi secara berjenjang guna menjaring figur terbaik dan paling representatif untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Adapun kualifikasi utama yang menjadi syarat pengusungan tidak hanya menekankan pada aspek akademik (seperti kepemilikan ijazah pendidikan minimal strata satu) tetapi juga mencakup kapasitas intelektual, pola pikir yang inovatif,

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Mariam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- George Steiner. 1979. *Strategic Planning*. Free Press.
- Haiman. H. & Hoelgert, R.L. 1989. *Supervision: Concept And Practice Management*. Ohio: South-Western Publishing Co.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hungtington, Samuel P. 1996. *The Class of Civilization and Remaking of World Order*, (Eds. Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Imam, Moejiono. 2002. *Kepemimpinan Dan Keorganisasian*. Yogyakarta: Pt Grafindo Persada Jakarta
- Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Jakarta: Institut Democracy and Welfare
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sutrisno, Hadi. 2004. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Winarno, Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.

# JALAN TERJAL MENUJU GARIS AKHIR: MENGURAI PROBLEMATIKA PENYELESAIAN BATAS DARAT INDONESIA-TIMOR LESTE

---

Yosef Serano Korbaffo\*

Penyelesaian batas darat Indonesia-Timor Leste tidak berjalan mulus. Tahun 2005, meskipun 907 koordinat titik batas (96%) berhasil disepakati kedua negara, ada dua persoalan pada segmen *unresolved* dan *unsurveyed* yang diwariskan hingga saat ini. Pertanyaan lalu muncul, bagaimana proses penyelesaian batas darat pada kedua segmen dimaksud. Sejauh ini penyelesaian batas kedua negara sudah *on the track*. Misalnya titik Dilumil-Memo berhasil diselesaikan pada tahun 2013. Jauh sebelum itu, 4 titik pada segmen *unsurveyed* pun sudah disepakati, namun ditolak oleh masyarakat lokal setempat. Bahkan beberapa titik pada kedua segmen tersebut sudah diselesaikan secara prinsipil pada tahun 2019 yang dituangkan dalam dokumen *Agreed Principles*. Bahkan pengaturan teknis pada titik Bidjaelesunan-Oben dan 4 titik lainnya pada segmen *unsurveyed* sudah berhasil diselesaikan, menyisakan titik Noelbesi-Citrana. Persoalan mulai muncul ketika pengaturan teknis pada titik Noelbesi-Citrana, di mana kedua negara tidak berhasil membagi wilayah Naktuka akibat perbedaan pandangan. Kegagalan ini turut menyeret beberapa titik lainnya semisal 4 titik pada segmen *unsurveyed*, dan titik Bidjaelesunan-Oben yang telah diselesaikan. Alhasil, penyelesaian titik-titik yang lain pun mesti ditangguhkan sementara waktu: suatu tragedi yang bisa memicu peristiwa-peristiwa seperti yang dialami oleh Petrus Taek Oki terulang kembali di masa depan. Semoga tidak!

## Pendahuluan

Pada hari Senin, 25 Agustus 2025, Paulus Taek Oki, seorang warga desa Inbate, kecamatan Bikomi Nilulat, kabupaten Timor Tengah Utara, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia ditembak oleh anggota Unit Patroli Perbatasan/Unidade De Patrulhamento Da Fronteira (UPF) Timor Leste. Insiden penembakan itu dipicu oleh aksi protesnya bersama beberapa warga lainnya akibat pemasangan pilar batas negara yang dilakukan oleh warga Timor Leste di lokasi yang masih menjadi sengketa (Cahyaningrum,

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Informasi Geospasial. (2023). *Perkembangan Perbatasan Darat RI-RDTL Terkait Unresolved Segment Noelbesi-Citrana*.
- Binsasi, H., & Korbafo, Y. S. (2021). Alasan Masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat Menolak Penyelesaian Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste di titik Un-Surveyed Segment. *Jurnal Poros Politik*, 3(2), 25–31.
- Cahyaningrum, Siwi Yunita & Herin, F. P. (2025). Bagaimana Kronologi Penembakan WNI di Perbatasan Timor Leste? *Www.Kompas.Id*.  
<https://www.kompas.id/buku/bagaimana-kronologis-penembakan-wni-di-perbatasan-timor-leste>
- Hadiwijoyo, S. S. (2009). *Batas Wilayah Negara Indonesia-Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*. Gava Media.
- Hadiwinata, B. S. (2009). Sejarah Perbatasan Indonesia-Timor Leste. In G. Wuryandari (Ed.), *Keamanan Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Pustaka Pelajar.
- Kalembang, E., & Korbafo, Y. S. (2022). Non-State Actors' Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective. *Jurnal Global & Strategis*, 16(1), 51–74. <https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.51-74>
- Korbafo, Y. S., Kalembang, E., & Nurak, R. (2024). Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges. *Jurnal Global & Strategis*, 18(1), 183–202.  
<https://doi.org/10.20473/jgs.18.1.2024.183-202>
- Lake, P. (2020). Aspirasi Masyarakat Adat Indonesia dalam Proses Negosiasi Penyelesaian Masalah Perbatasan RI-RDTL. In *Memikirkan Ulang Pembangunan Yang Berkeadilan Sosial dan Berperikemanusiaan* (pp. 253–276).
- Pamungkas, C. (2016). PERBATASAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL: Studi Perbatasan RI-Timor Leste. *Jurnal Ledalero*, 15(1), 150.  
<https://doi.org/10.31385/jl.v15i1.34.150-175>
- Sugito. (2013). Analisis Terhadap Misi Peacebuilding United Nations Transition Administration in East Timor (Untaet). *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 48–55.  
<https://doi.org/10.18196/hi.2013.0026.48-55>

- Susilo, H., Rijanta, R., & Zubaidi, A. (2024). Protracted Unresolved Segment of Indonesia-Timor Leste Land Boundary in Noel Besi – Citrana Region. *Geopolitics Quarterly*, 20(2), 279–301.  
<https://doi.org/10.22034/igq.2024.184550>
- Sutisna, S., & Handoyo, S. (2006). *Delineation and Demarcation Surveys of the Land Border in Timor: Indonesian Perspective*. February.  
<https://www.researchgate.net/publication/240635277>
- Wuryandari, G. (2009). Persoalan Demarkasi dan Keamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste. In G. Wuryandari (Ed.), *Keamanan Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Pustaka Pelajar.

## PROFIL PENULIS

### Egidius Fkun



Penulis lahir di Kiupukan pada 24 September 1984. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Timor sejak tahun 2017. Sebelumnya, pada tahun 2016, diangkat sebagai dosen tetap di STISIP Fajar Timur Atambua. Pendidikan sarjana (S1) ditempuh di bidang Filsafat pada Fakultas Filsafat Agama, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, kemudian melanjutkan studi magister (S2) Ilmu Pemerintahan dengan konsentrasi Pemerintahan Daerah di STPMD “APMD” Yogyakarta, dan meraih gelar doktor (S3) Ilmu Administrasi dengan konsentrasi Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan fokus riset pada kolaborasi pemerintahan, tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. Penulis juga terbuka untuk melakukan penelitian kolaboratif dengan berbagai disiplin ilmu secara khusus tentang isu-isu perbatasan. Penulis dapat dihubungi melalui email: egifkun6@gmail.com.

### Elpius Kalemang



Penulis lahir di Makale Toraja, pada 11 September 1963. Penulis adalah Dosen aktif Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Latar belakang pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu pemerintahan di Universitas Pepabri Makasar, selanjutnya menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2005 dengan konsentrasi Politik Lokal & Otonomi daerah, dan akhirnya menyelesaikan pendidikan *Doctor* Ilmu Sosial di Universitas Diponegoro pada Tahun 2018. Karya-karya ilmiah Penulis dapat dibaca melalui tautan: <https://scholar.google.com/citations?user=kVw1kxIAAAAJ&hl=id>

## Bernardus Seran Kehik



Penulis lahir di Ikumuan 31 Desember tahun 1972. Berprofesi sebagai dosen di program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Timor dari tahun 2004-sekarang. Menyelesaikan sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Timor Dili pada tahun 1996, Magister Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada tahun 2009, Pendidikan *doctoral* konsentrasi Ilmu Pemerintahan tahun 2021. Aktif menjalankan tridharma, buku-buku yang dipublikasikan antara lain (1) Partai Politik Pelaksanaan Fungsi Representasi Politik (2022), (2) Ilmu Pemerintahan Daerah: Menyelisik Hubungan Kerja Kepala Daerah Dengan DPRD (2022), dan (3) Dinamika Pelaksanaan Perjanjian Perbatasan Antara Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste (2022).

## Dian Festianto



Penulis lahir di Yogyakarta, memperoleh gelar M.A. di Universitas Gadjah Mada pada *Department of Politics and Government*. Sebelum menjadi dosen, penulis pernah berkarier menangani *HIV/AIDS Project In Groups With High Risk Behaviors* di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didanai oleh *United Nations Population Fund* (UNFPA) sebagai *Provincial Project Manager* tahun 2001-2005. Sejak tahun 2005, penulis mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Timor dan mengampu mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan, Metodologi Penelitian Sosial, Manajemen Konflik, dan Pengantar Ilmu Politik. Minat studi pada isu-isu politik, demokrasi, etnisitas, dan kebijakan publik. Beberapa karya ilmiah yang telah terbit pada jurnal terakreditasi nasional Sinta 2 dan 3 dan jurnal internasional, diantaranya; (1). Politik Etnis Flores Timur Di Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 (Politika, 2018); (2). *Synergy and Performance of Regional Device Organization in Implementation Policy of Agricultural Sector in North Central Timor Regency* (Savana Cendana, 2019); (3). *Performance Analysis of Agricultural Sector Policy in Timor Tengah Utara Regency* (Mimbar, 2019); (4). Politik Peranakan Tionghoa Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Moderat, 2020); (5). *Modality of Chinese Crossbreed Politicians in Local Democratization* (Politika, 2021); (6). *Implementation of Voter Data Update Based on PKPU Number 17 of 2020 in the Election of Regional Head in Belu Regency in 2020* (Science Publishing Group International Journal of Data Science and

*Analysis*, 2023); (7). *Economic Cooperation Strategy and Geopolitical Potential of BRICS and Indonesia (International Journal of Research and Analytical Reviews*, 2025). Nomor kontak: 081352503388.

### **Surya Yudha Regif**



Penulis adalah seorang akademisi dan peneliti yang berafiliasi dengan program studi Ilmu pemerintahan, FISIPOL, Universitas Timor, dengan spesialisasi ilmu politik dan tata kelola pemerintahan. Ia lahir pada 26 Agustus 1985 di Namu Sira-Sira, Binjai, Sumatera Utara. Menempuh pendidikan S1 ilmu politik di Universitas Sumatera Utara dan S2 di Magister ilmu politik Universitas Diponegoro. Ia telah berkontribusi pada berbagai artikel/buku nasional dan internasional serta jurnal penelitian dengan berbagai komunitas akademisi dan peneliti, membahas topik-topik seperti pelanggaran pemilu, partisipasi pemilihan, manajemen tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan literasi digital untuk isu-isu politik dan sosial, serta terlibat dalam kontribusi *policy brief* pada peran sertanya di T-20/G-20 Bali maupun T-20 *Communique/ Intersecting*, Berlin.

### **Yohanes Imanuel Naif**



Penulis lahir di Suanae, 01 Januari 1989 Menamatkan Pendidikan Dasar di SDN Suanae Tahun 2001, Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 1 Miomaffo Barat Tahun 2004, Pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Kefamenanu Tahun 2017 dan Menamatkan Pendidikan Strata 1 dan Strata 2 Pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Pada Tahun 2016 Bergabung menjadi Dosen Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Timor dan Pada Tahun 2020 Bergabung Menjadi Asesor Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Penulis Aktif Mengajar, Meneliti dan Melakukan Pengabdian serta Menerbitkan Artikel pada Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi dan Jurnal Terakreditasi Nasional serta 1 Artikel yang terpublikasi jurnal terindeks Scopus. Alamat Rumah Kelurahan Maubeli, RT/RW. 018/005 Kec. Kota Kefamenanu-TTU-NTT, Nomor HP. 081227623322.

## **Andre Pattipeilohy**



Penulis lahir di Kupang, 28 Juni 1986. Lulus Doktor Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana tahun 2023. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Timor pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP. Buku yang pernah ditulis dan diterbitkan meliputi: Buku referensi berjudul Akuntabilitas Layanan Publik bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya (Literasi Nusantara Malang, 2023), Manajemen Pemerintahan Teori dan Praktik (Media Penerbit Indonesia, 2024), Metode Penelitian Ilmiah Modern Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Media Penerbit Indonesia, 2024) yang berkolaborasi dengan penulis lainnya.

## **Verawati Skaut**



Penulis lahir di Desa Nekmese, 14 Februari 1998. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Sosiologi di Universitas Nusa Cendana tahun 2020 dan Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta tahun 2023 dengan peminatan pada bidang Pemerintahan Desa. Pada Tahun 2025 diterima sebagai CPNS Dosen pada Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor. Universitas Timor. Nomor HP 081236436065. Email: skautverawati@gmail.com.

## **Handrianus Vianey Melin Wula**



Penulis lahir di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Menyelesaikan pendidikan S1 di STMIK AMIKOM Yogyakarta (2009) dan S2 Ilmu Pemerintahan di STPMD APMD Yogyakarta (2014). Sejak 2018, menjabat sebagai Dosen Tetap PNS di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Timor, dengan fokus kajian pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat perbatasan. Selain itu, sejak 2021 aktif sebagai Asesor di Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN PDM) Propinsi NTT. Mata kuliah yang diampu antara lain Pemerintahan Desa, Sistem Pemerintahan Indonesia, serta Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Telah menulis beberapa buku dan Publikasi artikel ilmiah. Dan juga aktif dalam penelitian hibah DRTPM dan

pengabdian kepada masyarakat, khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan pembangunan di wilayah perbatasan. Keahlian: Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Akreditasi Pendidikan, dan Inovasi Kebijakan Publik. Email: handrywula@unimor.ac.id. WhatsApp: +6282133241322.

### **Fransiskus Atok**



Penulis lahir di Wehas 30 Agustus 1978, Penulis Adalah Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Timor. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2010, pada 2014 Penulis menyelesaikan Pendidikan S2 di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Email: atokfrans@gmail.com

### **Yosef Kristoforus Taekab**



Penulis lahir di Kefamenanu, 14 September 1990. Gelar Sarjana Ilmu Politik ia peroleh dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang pada Tahun 2015, dan Magister Ilmu Politik dari Universitas Airlangga pada Tahun 2018. Mata kuliah yang diasuh antara lain Komunikasi Politik, Kekuatan Politik Indonesia, serta Komunikasi Pemerintahan. Riset-riset yang ia geluti berkutat pada tema Komunikasi Politik dan PEMILU di wilayah TTU dan sekitarnya yang terafiliasi sebagai Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan. Ia sangat terbuka pada kolaborasi riset untuk masalah-masalah politik, dan dapat dihubungi via WA (085238677088), atau via email (ryzthotaekab@gmail.com). Beberapa rekaman publikasinya bisa dilihat pada:  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=yosef+kristoforus+taekab&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=yosef+kristoforus+taekab&btnG=)

## Heribertus Binsasi



Penulis lahir di Manusasi, 8 Oktober 1990. Ia mendapatkan gelas Sarjana Pendidikan dari Universitas Nusa Cendana (Undana) pada Tahun 2016. Pada Tahun 2019, gelar Magister Pendidikan Kewarganegaraan berhasil ia peroleh dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Bidang kajian yang digeluti adalah tentang kewarganegaraan dan identitas nasional di wilayah perbatasan NKRI-RDTL, dengan latar belakang historis, kultural, sosial, dan politik. Sejumlah hasil penelitiannya tentang tema-tema tersebut telah dipublikasikan pada berbagai jurnal nasional maupun internasional.

## Ignasius Usboko



Penulis lahir di Manumean, 31 Juli 1980 bertambat hati dengan: Emirentiana Gratia Lakapu dengan buah cinta: Angeline Karni Agustine Usboko. Pendidikan dimulai di SDK Manumean 1987-1993, SMPN Lurasik 1994-1997, SMAS Lalian 1997-2000, SMUK Suria Atambua 2001-2002, S1 Ilmu Pemerintahan Fisipol Unimor Kefamenanu 2022-2006, berlanjut di Program Studi Magister Ilmu Politik Undip Semarang 2013-2016. Pada 2007/2008 mulai mengabdikan sebagai dosen luar biasa di Unimor, 2012 sampai sekarang dosen tetap. Pada 2010 menjadi asisten ahli, 2022 mencapai lektor. Bidang keahlian: Manajemen Politik dan Politik Perbatasan. Fokus kajian manajemen politik lokal-global, demokrasi lokal dan pengajar Manajemen Konflik, Etika Pemerintahan, Pemikiran Politik Indonesia. Ia aktif riset partisipatif, pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber dalam forum akademik di organisasi kepemudaan. Ia juga turut mendorong pendekatan hibrid dalam kebijakan perbatasan, serta menjadi inisiator penguatan demokrasi konsensus di Timor terutama TTU melalui kerja-kerja akademik dan kolaborasi lintas desa pedalaman-desa perbatasan. Karya terpublikasi seperti *Institusionalisasi Demokrasi Konsensus Dalam Pemilihan Kepala Desa*, *Modality of Chinese Crossbreed Politicians in Local Democratization* dan Partisipasi Masyarakat sebagai Bentuk Distribusi Kekuasaan Dalam Pengelolaan Obyek Wisata pada link: Ignasius Usboko-Google Scholar, Wa: 085253252434, email: usbokoignasius@gmail.com

### **Marisa S. B. Seran**



Penulis lahir di Kupang serta memperoleh Gelar Magister pada Program PASCASARJANA Universitas Nusa Cendana pada tahun 2017 Pada Program Studi Ilmu Administrasi dengan Bidang Keahlian Administrasi Keuangan Publik. Sebelum menjadi Dosen Pada Universitas Timor Program Studi Ilmu Pemerintahan, Penulis Memiliki Karier sebagai Pengelola Keuangan Pada Koperasi Citra Akademika FISIP Undana Kupang sejak tahun 2006 sampai tahun 2018. Penulis juga aktif melakukan penelitian serta pengabdian pada masyarakat dalam masalah-masalah keuangan serta melakukan kolaborasi penelitian lintas universitas dan menghasilkan karya-karya publikasi. Penulis juga pernah memenangkan hibah yang diselenggarakan BRIN terkait “Karya Audiovisual Program Akuisisi Pengetahuan Lokal 2024”.

### **Handrianus Nino**



Penulis lahir di Kefamenanu pada tanggal 1 Maret 1988, memperoleh gelar Sarjana Filsafat (S.Fil.) pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, NTT pada tahun 2012. Sebelum menjadi dosen, penulis sempat menjadi tenaga pengajar pada Sekolah Swasta Fajar Timur Kobalima dari tahun 2012-2014, kemudian melanjutkan pendidikan Magister pada Universitas Brawijaya Malang dan memperoleh gelar Magister Sosial, pada tahun 2019. Sejak tahun 2021 penulis menjadi dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dan mengampuh mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial, Pengantar Sosiologi, Sosiologi Politik, Teori Pembangunan, Perubahan Sosial dan Dinamika Pembangunan. Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah permasalahan sosial perbatasan NKRI dan RDTL, dan rekam jejak ini dapat diakses melalui tautan: [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=handrianus+nino&oq=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=handrianus+nino&oq=), atau melalui e-mail: [handrianusnino@unimor.ac.id](mailto:handrianusnino@unimor.ac.id).

## Melkianus Suni



Penulis lahir di Manumelan, 05 Mei 1991. Menyelesaikan Sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan dari Universitas Timor pada tahun 2015, dan Magister Sosial dari Universitas Brawijaya pada Tahun 2017. Kini Menjadi dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Timor dan mengampuh mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial, Pengantar Sosiologi, Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan, Gender dan Politik, Teori Pengambilan Keputusan. Menggeluti riset-riset pada tema Masalah-masalah sosial, baik yang terafiliasi sebagai Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, maupun Pegiat Komunitas Simpang 9 Kefamenanu. Sejak Tahun 2019, juga aktif melakukan riset dan inovasi tentang masalah Kemiskinan, Pemberdayaan, Isu Gender, Dinamika Pemerintahan dan Pariwisata. Kontak Penulis pada Nomor 081236450217, atau via email pada alamat Melkysuny2345@gmail.com. Beberapa publikasinya dapat dilihat pada tautan: <https://scholar.google.com/citations?user=nyjWgaYAAAAJ&hl=en>

## Medan Yonathan Mael



Penulis lahir di Atambua, memperoleh gelar M.Si. di Universitas Nusa Cendana Kupang. Sejak tahun 2005, penulis mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Timor dan mengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan, Kebijakan Pemerintahan. Analisis Kebijakan Pemerintahan dan Legislasi Di Indonesia. Minat studi pada isu-isu politik, demokrasi, etnisitas, dan kebijakan publik. Beberapa karya ilmiah yang telah terbit pada jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional, diantaranya; (1). *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Program Padat Karya Pangan di Kecamatan Noemuti (Poros Politik 2017)*; (2) *Synergy and Performance of Regional Device Organization in Implementation Policy of Agricultural Sector in North Central Timor Regency* (Savana Cendana, 2019); (3). *Pola Rekrutmen calon DPRD Partai Politik Persatuan Indonesia (PERINDO) Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Timor Tengah Utara (Poros Politik, 2020)*; (3) *Implementation of Voter Data Update Based on Pkpu Number 17 of 2020 in the Election of Regional Head in Belu Regency in 2020* (Science Publishing Group *International Journal of Data Science and Analysis*, 2023); (4). *Optimizing the Role of Micro, Small, and Medium Enterprises in Improving the Welfare*

*of Napan Rural Communities in Indonesia* (Jurnal Literasi Indonesia, 2024.)  
 (5) *Economic Cooperation Strategy and Geopolitical Potential of BRICS and Indonesia* (International Journal of Research and Analytical Reviews, 2025);  
 (6). *The Effectiveness of the Prosperous Rice Program (Rastra) in Improving the Welfare of Underprivileged People in Weliman District, Malacca Regency* (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP) 2025.  
 Nomor kontak: 081246016661.

## M. Angela Merici Siba



Penulis lahir di Pulau Lembata, 27 Januari 1994. Penulis menyelesaikan studi sarjana Ilmu Politik di Universitas Respati Yogyakarta pada tahun 2016 dan Magister Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019. Sejak tahun 2024 penulis menjadi dosen di Universitas Timor dengan mata kuliah yang diampu yaitu *digital governance*, isu-isu global, dan manajemen pemerintahan. Minat studi pada politik lingkungan global dan gender. Adapun penelitian yang sudah dipublikasikan pada jurnal terakreditasi di antaranya (1) *Implementation of Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) in Dealing with Illegal Timber Trade in Indonesia*, dan (2) *Strategies for Women as Key Actors in Resolving Conflicts Over Communal Forests in Pubabu-Besipae*. Penulis dapat dihubungi melalui Nomor Kontak: 082217527847.

## Mariano Sengkoen



Penulis lahir di Dili, 29 Oktober 1989. Gelar Sarjana Filsafat ia peroleh dari Fakultas Filsafat Agama, Unika Widya Mandiri Kupang pada Tahun 2012, dan Magister Studi Pertahanan Nasional dari Universitas Brawijaya pada Tahun 2020. Mata kuliah yang diasuh antara lain Negara dan Masyarakat Sipil, Gender dan Politik, serta Isu-Isu Global. Riset-riset yang ia geluti berkuat pada tema *Human Security* di wilayah Perbatasan NKRI-RDTL, baik yang teafiliasi sebagai Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, maupun Pegiat Komunitas Simpang 9 Kefamenanu. Sejak Tahun 2023, ia juga aktif melakukan riset dan inovasi tentang masalah Migrasi Tenaga Kerja dan *Human Trafficking*, *Stunting*, dan Pariwisata. Ia sangat terbuka untuk kolaborasi riset interdisipliner dan transdisipliner untuk masalah-masalah

perbatasan NKRI-RDTL, dan dapat dihubungi via WA (081328803726), atau email (sengkoenmariano@yahoo.co.id). Beberapa publikasinya dapat dilihat pada tautan:

[https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=6PxahccAAAAJ&view\\_op=list\\_works&sortby=pubdate](https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=6PxahccAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate).

### **Yakobus Kolne**



Penulis lahir di Haenfeka, 28 Oktober 1980. Gelar Sarjana Strata satu (S1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor pada Tahun 2005, dan Menempuh Pendidikan Magister dengan konsentrasi Manajemen Politik di Universitas Diponegoro Semarang pada Tahun 2014. Mata kuliah yang diasuh antara lain Komunikasi Pemerintahan, Sistem Pemerintahan Desa, dan Sistem Politik Indonesia. Riset-riset yang ia geluti berkuat pada tema Dinamika Sosial di wilayah Perbatasan NKRI-RDTL dan Politik Etnisitas yang teafiliasi sebagai Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan. Selain riset, juga melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang masalah-masalah sosial dan pemerintahan. Ia sangat terbuka untuk kolaborasi riset interdisipliner dan transdisipliner untuk masalah-masalah perbatasan NKRI-RDTL, dan dapat dihubungi via WA pada Nomor 081359094162, atau via email pada alamat [graciakolne@gmail.com](mailto:graciakolne@gmail.com) Beberapa publikasinya dapat dilihat pada tautan:

<https://scholar.google.com/citations?user=cmPvQiwAAAAJ&hl=en>.

### **Ronaldus Nurak**



Penulis lahir di Kefamenanu, 30 April 1990. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Melanjutkan studi magister di Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Magister Hubungan Internasional konsentrasi Organisasi Internasional. Saat ini aktif sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Mata kuliah yang diampu antara lain: Isu-isu Global, Administrasi dan Organisasi Internasional, Logika, Filsafat Ilmu, dan Pendidikan Agama Katolik. Konsentrasi penelitian berfokus pada kajian organisasi internasional dan konflik perbatasan, khususnya dinamika perbatasan Indonesia-Timor Leste. Selain kegiatan akademik, ia juga aktif

menulis modul ajar, artikel ilmiah, serta terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan mahasiswa dan masyarakat di kawasan perbatasan.

### **Remigius Seran**



Penulis lahir di Sonraen, 5 Agustus 1987. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Melanjutkan studi magister di Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Magister Hubungan Internasional, konsentrasi globalisasi dan strategi. Saat ini aktif sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Mata kuliah yang diampu antara lain: Isu-isu Global, Administrasi dan Organisasi Internasional, Logika, Filsafat Ilmu, dan Pendidikan Agama Katolik. Konsentrasi penelitian berfokus pada kajian globalisasi, khususnya dalam kaitan dengan dinamika kehidupan perbatasan di Indonesia dan Timor Leste, Remigius juga aktif dalam kegiatan yang melibatkan mahasiswa untuk mengembangkan kemahasiswaan.

### **Fridus Bria**



Penulis lahir di Ikumuan 21 April 1994, memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Timor pada Tahun 2017, kemudian mendapatkan gelar Magister Ilmu Politik di Universitas Diponegoro pada tahun 2019. Berprofesi sebagai dosen di Universitas Timor, pada Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Aktif melakukan tridharma dan berfokus pada bidang demokrasi dan tatakelola politik. Hasil-hasil publikasi karyanya dapat dilihat pada:

<https://scholar.google.com/citations?user=snZeKwEAAAAJ&hl=id>

## Adeodata Laniria Charla Barros Mbiri



Penulis lahir di Dili pada tanggal 10 Januari 1996. Penulis adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Timor. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Timor pada Tahun 2017 dan menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2019. Penulis aktif melakukan tridharma di bidang kajian politik lokal dan politik kebijakan daerah. Beberapa karyanya dapat dilihat di <https://scholar.google.com/citations?user=49M85VcAAAAJ&hl=id>

## Yosef Serano Korbaffo



Penulis adalah dosen tetap di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Indonesia sejak tahun 2020. Selama ini penulis mengampu beberapa mata kuliah seperti: Isu-Isu Global dan Organisasi Internasional; Negara dan Masyarakat Sipil; dan Administrasi dan Organisasi Internasional. Penulis tertarik untuk meneliti isu-isu yang terkait dengan Ilmu Hubungan Internasional. Beberapa karya yang telah diterbitkan pada Jurnal Nasional dan Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 2 dan Sinta 4) antara lain: *Alasan Masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat Menolak Penyelesaian Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste di titik Un-Surveyed Segment* (Jurnal Poros Politik, 2021); *Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam Perspektif Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture)* (Jurnal Poros Politik, 2021); *Dimensi Non-Material dalam Pemahaman Masyarakat Atoni Meto tentang Food Security:(Studi Kasus Ritus Bertani di Desa Sainoni)* (Jurnal Transborder, 2023); *Upaya Aktor Non-Negara Menyelesaikan Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste di titik Un-Surveyed Segment: Perspektif Konstruktivisme* (Jurnal Global Strategis, 2022); *Penyelesaian Sengketa Batas Darat Indonesia-Timor Leste pada Unresolved Segment Perspektif Neoliberalisme: Upaya dan Tantangan* (Jurnal Global Strategis, 2024); *Cross-Border Data Flows and State Sovereignty: Balancing Globalization and National Security in the Digital Age* (Jurnal Smart Hukum, 2025). Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana Filsafat Agama pada program Studi Filsafat, Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada tahun 2010, dan

pendidikan magister Hubungan Internasional di Universitas Airlangga pada tahun 2018. Penulis dapat dihubungi melalui surel: [yosefserano@unimor.ac.id](mailto:yosefserano@unimor.ac.id)

Buku ini merupakan cara Dosen-Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan merayakan Pesta Perak (25 Tahun) Universitas Timor, sekaligus merefleksikan dan menafsirkan ulang kiprahnya dalam mengembangkan pokok keilmuan pemerintahan di kawasan perbatasan. Dalam pada itu, buku ini mengajukan sebuah refleksi komprehensif mengenai bagaimana kawasan perbatasan NKRI-RDTL menjadi ruang tempat dinamika politik, identitas nasional, kebijakan publik, dan transformasi governansi berlangsung secara intens dan multidimensional. Dengan menempatkan perbatasan sebagai arena epistemik, yakni sebagai laboratorium sosial-politik yang merefleksikan kondisi dan kapasitas negara, buku ini menggabungkan kerangka analitis ilmu pemerintahan dengan perspektif antropologis, kebijakan publik, ekonomi politik, dan teknologi digital untuk menjelaskan bagaimana tata kelola negara bekerja dalam konteks yang paling kompleks sekaligus paling strategis.

Wacana mengenai nasionalisme Indonesia dalam arus globalisasi menjadi landasan argumentatif awal, yang menegaskan bahwa perbatasan bukan hanya garis kedaulatan tetapi juga ruang artikulasi identitas nasional yang terus dinegosiasikan dalam dinamika politik kontemporer. Dalam konteks inilah, praktik governansi di Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan seperti fragmentasi birokrasi, resistensi sosial, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan partisipasi yang semakin meningkat. Analisis mengenai tantangan *Good Governance* menempatkan isu perbatasan sebagai cermin kapasitas negara dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam kondisi sosial-politik yang dinamis dan berlapis. Transformasi tata kelola tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang kerap mengalami kerentanan struktural. Buku ini juga mengurai strategi pengentasan kemiskinan ekstrem yang memanfaatkan kearifan lokal sebagai modal sosial, serta menelaah bagaimana transisi kepemimpinan daerah memengaruhi arah kebijakan dan agenda pembangunan dalam mendukung program nasional *Asta Cita*. Analisis ini diperkuat oleh pembahasan mengenai aksesibilitas perbatasan, yang menegaskan bahwa keterhubungan fisik (berupa transportasi, infrastruktur jalan, dan konektivitas antarwilayah) merupakan prasyarat bagi integrasi ekonomi, stabilitas sosial, dan efektivitas pengawasan negara.

Dinamika sosial-budaya juga hadir secara signifikan melalui eksplorasi pengalaman perempuan dalam konteks adat Dawan. Perspektif gender, yang ditampilkan melalui narasi "Suara Feto", menggambarkan bagaimana perempuan memainkan peran strategis dalam pembangunan desa dan transformasi sosial, sekaligus menandai perlunya kebijakan yang lebih sensitif terhadap dinamika gender di wilayah perbatasan. Analisis mengenai budaya politik masyarakat eks Timor Timur dan praktik manajemen politik adaptif dalam kultur lokal Timor mengungkapkan bagaimana pengalaman historis, memori konflik, identitas etnis, dan simbol-simbol adat membentuk konfigurasi politik perbatasan yang berbeda dari wilayah lainnya di Indonesia. Pada tataran kelembagaan, buku ini menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menghadapi kompleksitas persoalan sosial-ekonomi perbatasan. Transformasi kebijakan publik di era digital juga dieksplorasi melalui analisis mengenai peluang dan tantangan pemerintahan digital, sekaligus menampilkan pendekatan inovatif *Natural Language Processing* (NLP) untuk memahami data sosial, mengevaluasi kebijakan lintas batas, dan mengoptimalkan respons negara terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan.

Dimensi pemerintahan kolaboratif hadir melalui kajian tentang kerja sama antar daerah, yang mampu menembus sekat birokrasi dan membuka ruang koordinasi lintas administratif. Perspektif ini diperkuat oleh pembahasan mengenai governansi ketahanan nasional di kawasan *invisible border*, yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam menjaga integritas wilayah, membangun kesadaran kebangsaan, dan mengelola risiko keamanan yang tidak selalu bersifat fisik. Buku ini juga membahas fenomena ekonomi informal melalui kajian tentang *Cross Border Trade* dan keberadaan pasar ilegal di perbatasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat sering kali dijalankan di luar kerangka formal negara, namun tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem sosial perbatasan. Praktik-praktik ini memperlihatkan adanya negosiasi antara kebutuhan ekonomi lokal dan rezim regulasi negara, yang pada akhirnya menuntut pendekatan kebijakan yang lebih akomodatif dan berbasis realitas empiris.

Aspek politik formal turut diperhatikan melalui analisis terhadap strategi rekrutmen calon kepala daerah oleh DPC PDIP Kabupaten Malaka, yang mencerminkan bagaimana partai politik beradaptasi dengan konteks sosial perbatasan untuk memperoleh legitimasi dan dukungan elektoral. Pengamatan ini memberikan gambaran bahwa politik perbatasan bukan hanya tentang hubungan negara dengan masyarakat, tetapi juga tentang bagaimana institusi politik memaknai konteks lokal sebagai bagian dari strategi kekuasaan.

Mengakhiri rangkaian analisis, buku ini menyajikan pembahasan mendalam mengenai kompleksitas penyelesaian batas darat Indonesia-Timor Leste, yang memperlihatkan bahwa persoalan batas bukan hanya persoalan diplomatik, tetapi juga persoalan identitas, distribusi sumber daya, dan dinamika sosial masyarakat lokal. Penyelesaian batas dipahami sebagai proses panjang yang memerlukan kejelian historis, sensitivitas sosial, serta pendekatan kolaboratif antarnegara.

Secara keseluruhan, buku ini menyimpulkan bahwa perbatasan NKRI-RDTL adalah ruang strategis yang menuntut inovasi governansi dalam skala nasional maupun lokal. Di wilayah inilah negara diuji dalam menjaga kedaulatan, menyediakan pelayanan publik yang inklusif, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta merespons perubahan global yang semakin cepat. Dengan pendekatan multidisipliner dan analisis mendalam, buku ini menawarkan kontribusi teoretis sekaligus praktis bagi penguatan governansi Indonesia di masa depan, khususnya dalam konteks perbatasan yang kompleks, dinamis, dan terus mengalami transformasi.



www.penerbitwidina.com



@penerbitwidina



penerbit widina



penerbitwidina@gmail.com



widina store



widina bookstore

Layanan Pembaca & Peminatan Buku  
0815-7000-699



SCANME

Pemerintahan

ISBN 978-634-246-644-5



9 786342 466445